

**ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH KABUPATEN
PATI PADA PERIODE SEBELUM DAN SELAMA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Periode 1995-2006)**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat – Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

PANCA DIAN SAFITRI

F 0105076

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS POTENSI DAERAH KABUPATEN PATI PADA MASA
SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(PERIODE 1995-2006)**

Surakarta, Juni 2009
Disetujui dan diterima oleh
Dosen Pembimbing

Drs. Mugi Rahardjo, MSi

NIP 080 055 250

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi.

Surakarta, Juli 2009

Tim Penguji Skripsi:

1. Izza Mafruhah, SE, Msi sebagai ketua (.....)
NIP. 132 300 215
2. Drs. Mugi Rahardjo, Msi sebagai pembimbing (.....)
NIP. 080 055 250
3. Tri Mulyaningsih, SE, Msi sebagai penguji (.....)
NIP. 132 327 431

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Dan sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena puas dengan apa yang diperbuatnya. Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi sampaikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang pandai.....

(HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

Tetaplah semangat, sebab hanya orang yang bersemangat yang bisa menjadi penyemangat. Tetaplah tabah dan sabar, sebab hanya orang yang tabah dan sabar saja yang bisa ber *amar makruf nahi munkar*.

(Anonim)

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

☞ *Bapak dan ibu tercinta*

☞ *Kakak-kakak dan adikku tersayang*

☞ *Saudara-saudaraku*

☞ *Teman-teman senasib seperjuangan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Potensi Daerah Kabupaten Pati pada Masa Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah (Periode 1995-2006)**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak sekali petunjuk, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Drs. Mugi Rahardjo, MSi.**, selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. **Drs. Kresno Sarosa Pribadi, MSi.**, selaku Ketua Jurusan Manajemen FE UNS dan **Izza Mafruah, SE, MSi.**, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen FE UNS.
4. **Hery Sulisty, SE.**, selaku Pembimbing Akademik.
5. **Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi UNS**, terima kasih atas semua bimbingannya selama ini.

6. **Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku** atas semua cinta, semangat, bimbingan, pengorbanan, harapan dan doa yang tidak pernah putus.
7. **BPS Semarang, BPS Kabupaten Pati dan Dinas Pertanian Kabupaten Pati**, terima kasih atas bantuan dalam pencarian data.
8. **Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2005**. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, Juni 2009

Panca Dian Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. PEMBANGUNAN EKONOMI	12
1. Arti Pembangunan Ekonomi.....	12
2. Sasaran Pembangunan Ekonomi.....	14
3. Tujuan Pembangunan Ekonomi.....	14
4. Permasalahan Pembangunan Ekonomi	15
B. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	17
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah	17
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Daerah	18
3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah.....	19
4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	21
C. OTONOMI DAERAH	24
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	24
2. Tujuan Otonomi Daerah	24
3. Alasan Adanya Otonomi Daerah	25
4. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan	26

dan Pembangunan Daerah	
D. PENELITIAN SEBELUMNYA	28
E. KERANGKA PIKIRAN	31
F. HIPOTESIS	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. RUANG LINGKUP PENELITIAN	34
B. JENIS DAN SUMBER DATA	34
C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	34
D. ANALISIS DESKRIPTIF	36
E. ANALISIS HIPOTESIS	36
1. Analisis <i>Shift Share</i> dan Analisis LQ.....	36
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	41
3. Analisis Overlay	42
4. Indeks Spesialisasi	43
5. Uji Beda Dua Mean	44
BAB IV GAMABARAN UMUM KABUPATEN PATI DAN	
PEMBAHASAN	47
A. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PATI	47
1. Letak dan Keadaan Geografis	47
2. Pemerintahan	50
3. Penduduk dan Penyebarannya	51
4. Sosial	58
5. PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	61
6. Tekanan Penduduk dan Daya Sukung Lahan	65
7. HDI (<i>Human Development Index</i>).....	71
B. PEMBAHASAN	72
1. Analisis Deskriptif	72
2. Analisis Hipotesis	78
a. Analisis <i>Shift Share</i> dan Analisis LQ	78
b. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	86
c. Analisis Overlay	90

d. Indeks Spesialisasi	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2000-2006 (Jutaan rupiah)	7
1.2 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2000-2006 (Jutaan Rupiah)	7
4.1 Luas dan Presentase Penggunaan Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah di Kabupaten Pati Tahun 2006 (Ha)	48
4.2 Ketinggian Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pati dari Permukaan Air Laut	50
4.3 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan serta Klasifikasi Perkembangan Desa Tahun 2006	51
4.4 Penduduk Kabupaten Pati Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Sex Ratio Keadaan Tahun 2006	53
4.5 Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kabupaten Pati Tahun 1999-2006	55
4.6 Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2006	57
4.7 Banyak Sekolah, Murid, Guru TK dan Ratio Murid terhadap Guru di Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2006	59
4.8 Jumlah PUS, Peserta KB Aktif dan Persentasenya terhadap PUS di Kabupaten Pati Per Kecamatan	60
4.9 Sarana Peribadatan di Kabupaten Pati Dirinci Tifa Jenis Per Kecamatan Tahun 2006	61
4.10 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2006 (Jutaan rupiah)	62
4.11 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2006 (Jutaan rupiah)	63

4.12 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2002-2006 (Prosentase)	63
4.13 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha Harga Konstan Tahun 2002-2006 (Prosentase)	64
4.14 Data HDI Kabupaten Pati	72
4.15 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2006 (Jutaan Rupiah)	73
4.16 PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-2006 (Jutaan Rupiah)	76
4.17 Hasil Analisis <i>Shift Share</i> pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah	79
4.18 Hasil Analisis LQ Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah	83
4.19 Hasil Analisis DLQ Kabupaten Pati Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah	85
4.20 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah	87
4.21 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah	90
4.22 Hasil Analisis Indeks Spesialisasi Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah	96

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI DAERAH KABUPATEN PATI PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (PERIODE 1995-2006)

Oleh :

PANCA DIAN SAFITRI

F 0105076

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi daerah Kabupaten Pati pada periode sebelum (1995-2000) dan selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan analisis, dengan menggunakan data sekunder yang berupa variabel PDRB beserta komponen-komponennya di Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah. Adapun metode analisis data yang digunakan antara lain Analisis Shift-Share, analisis LQ dan DLQ, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis Overlay, analisis Indeks Spesialisasi, analisis tekanan penduduk dan daya dukung lahan serta *Human Development Index* (HDI). Selain itu, untuk menguji apakah terjadi peran sektor ekonomi pada periode sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah digunakan uji beda dua mean untuk sampel berpasangan.

Dari hasil perhitungan uji beda dua mean didapat hasil bahwa komponen D_{ij} dan M_{ij} yang berbeda secara *significant* ($t_{hit} < t_{tsb}$) pada periode sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan komponen C_{ij} dan N_{ij} tidak berbeda secara *significant* pada kedua era tersebut. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan sektor basis pada kedua periode, hal ini diperkuat dengan uji beda dua mean. Berdasarkan analisis MRP menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan sektor potensial pada kedua periode, hal ini diperkuat dengan uji beda dua mean. Hasil analisis Overlay menunjukkan bahwa sektor unggulan pada periode sebelum otonomi daerah adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; dan keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah, sektor unggulan Kabupaten Pati adalah sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Berdasarkan analisis indeks spesialisasi didapat hasil bahwa pola pertumbuhan ekonomi baik pada era sebelum maupun pada era otonomi daerah adalah semakin menyebar/tidak terspesialisasi. Dari pengujian beda 2 mean didapat hasil bahwa perubahan koefisien spesialisasi antara kedua era tersebut tidak terdapat perbedaan yang *significant*.

Kata kunci: *potensi daerah, otonomi daerah, PDRB(Produk Domestik Regional Burto)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut. Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkn tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Tri Widodo, 2006: 4). Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang.

Todaro (1997: 14) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Arsyad (1999: 108) menyatakan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah) (Arsyad, 1999: 108). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Berkembangnya demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen nasional untuk mewujudkan pola pemerintahan yang baik (*good governance*) mendorong adanya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu pola pokok penyelenggaraan berbagai aktivitas pembangunan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No 32 Tahun 2004). Pengertian desentralisasi ini tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah karena sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah diwujudkan sebagai

hasil dari pendelegasian sebagian urusan pusat berdasarkan perspektif yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan otonomi daerah ini ditandai dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implikasi terpenting bagi daerah dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut adalah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan juga sejumlah kewenangan untuk mengupayakan dan mengelola sumber-sumber keuangan guna pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara filosofis memiliki dua tujuan utama yaitu:

tujuan demokrasi sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal

tujuan kesejahteraan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002: 59).

Implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah membutuhkan sejumlah perangkat pengaturan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya negara yang digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publiknya. Sebagai daerah otonom yang berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan sejumlah kewenangan mengupayakan dan mengelola sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan

sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah berkenaan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah dan tujuan pengintegrasian pembangunan antarsektor di dalam suatu wilayah. Dalam perspektif ini, dalam upaya merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan, fungsi dan peran Pemerintah Daerah sangatlah penting, terutama dalam era desentralisasi dan otonomi daerah dewasa ini.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah juga sangat bermakna. Tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi daerah akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Di samping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya (HAW Widjaja, 2005: 77).

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemda diharapkan mampu mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki daerahnya. Dengan begitu, akan mempermudah kerja Pemda dalam mengidentifikasi dan mengeksplor SDA yang dimiliki sehingga dapat

meningkatkan perekonomian di daerah. Namun, dalam pemanfaatan SDA tersebut, Pemda juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan untuk mengatasi adanya degradasi SDA. Dengan adanya pemeliharaan SDA, akan dimungkinkan kegiatan perekonomian daerah dapat terus berkelanjutan atau tidak hanya berhenti pada beberapa periode saja.

Adapun konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu daerah harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan letaknya, Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis dalam bidang ekonomi dan memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan sumber-sumber daya ini sangat menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pati. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Pati harus mampu mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi daerah yang dimiliki.

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik itu PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku.

Adapun PDRB Kabupaten Pati dapat dilihat pada oleh tabel 1.1 dan 1.2.

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2000-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1196868.02	1365198.01	1471000.86	1550140.70	1673221.87	1877187.62	2169278.01
2. Pertambangan dan Penggalian	24416.87	27722.21	29432.67	31363.45	33477.35	35978.11	42576.49
3. Industri Pengolahan	300480..293	342842.59	380521	418116.47	463231.23	514325.64	599909.43
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	25905.18	34441.49	53315.42	70530.97	86210.00	98158.71	112803.99
5. Bangunan	67381.97	70622.69	77910.95	86426.62	99840.03	115415.08	138717.38
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	413303.63	471991.32	526317.52	570159.76	620162.78	689000.84	795244.77
7. Pengangkutan dan Komunikasi	85857.66	91846.91	109867.27	119469.68	144176.00	169233.79	194077.31
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	160851.24	174570.73	197509.33	239440.56	274303.10	291913.36	332518.51
9. Jasa-Jasa	214906.87	262431.39	282166.23	370794.64	391188.35	441260.46	518657.54
Total PDRB	2489971.73	2841667.34	3138053.24	3461272.72	3808092.25	4260493.61	4942598.64
PDRB Per Kapita	1819.84	1955.78	2135.49	2414.99	2647.06	2904.81	3165.02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

Tabel 1. 2 Tabel PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2000-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1261917.18	1550222.16	1550949.02	1674400.33	1771384.24	1925457.29	2624652.25
2. Pertambangan dan Penggalian	25743.91	29228.90	31032.32	33068.04	35296.83	37933.50	44890.50
3. Industri Pengolahan	316811.24	361475.91	401202.11	440840.88	488407.61	542278.97	632514.19
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	29416.09	39109.31	60541.21	80089.97	97893.97	111462.08	128092.22
5. Bangunan	71044.14	74461.00	82145.38	91123.87	105266.29	121687.83	146256.60
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	446434.14	509826.25	568507.25	615863.90	669875.17	744231.31	858991.78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	90894.64	97235.26	116312.82	126478.56	152634.33	179162.18	205463.18
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	164987.34	179059.61	202588.05	245597.49	281356.48	299419.57	341068.83
9. Jasa-Jasa	260020.06	317520.91	341398.49	448631.75	473306.50	533889.73	627533.99
Total PDRB	2667268.75	3158139.31	3354676.64	3756094.79	4075421.41	4495522.45	5609463.54
PDRB Per Kapita	2287.55	2683.95	2829.79	3152.24	3387.21	3702.15	4533.86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006 (Data Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa total PDRB Kabupaten Pati baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu pula dilihat dari nilai PDRB per sektor ekonomi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Pendapatan regional per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku mencapai 4.876.254.000 rupiah, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 yang hanya mencapai 4.282.612.000 rupiah. Sedangkan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan naik dari 4.677.231.477 rupiah menjadi 5.325.925.828 rupiah.

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Pati pada masa sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencari dan menciptakan sektor unggulan daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS POTENSI DAERAH KABUPATEN PATI PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (1998-2006)”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perubahan struktur ekonomi prioritas yang diukur dengan analisis *Shift Share (SS)* dan LQ (Location Quotient) di Kabupaten Pati pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006)?

Bagaimana kondisi kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pati yang diukur dengan parameter MRP (Model Rasio Pertumbuhan) pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006)?

Bagaimana gambaran kegiatan perekonomian di Kabupaten Pati yang memberikan sumbangan dominan atau besar berdasarkan analisis Overlay pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006)?

Bagaimana tingkat spesialisasi ekonomi suatu daerah diukur dengan parameter indeks spesialisasi pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- ✧ Untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi prioritas yang diukur dengan analisis *Shift Share (SS)* dan LQ (Location Quotient) di Kabupaten Pati pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).
- ✧ Untuk mengetahui kondisi kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pati yang diukur dengan parameter MRP (Model Rasio Pertumbuhan) pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).
- ✧ Untuk mengetahui gambaran kegiatan perekonomian di Kabupaten Pati yang memberikan sumbangan dominan atau besar berdasarkan analisis Overlay pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).
- ✧ Untuk mengetahui tingkat spesialisasi ekonomi suatu daerah diukur dengan parameter indeks spesialisasi pada masa sebelum (1995-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

10. Manfaat praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberi sumbangan informasi kepada pemerintah Kabupaten Pati tentang struktur

ekonomi, sektor prioritas atau sektor unggulan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan di Kabupaten Pati.

11. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang penting bagi kegiatan penelitian lainnya, baik bidang sejenis atau yang lainnya, serta untuk menambah pengetahuan dan penerapan teori ekonomi yang telah didapat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMBANGUNAN EKONOMI

Arti Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Irawan dan M. Suparmoko, 1993 :5).

Pembangunan ekonomi menurut pengukuran tradisional diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional, yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama, untuk berupaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan produk domestik brutonya (PDB) pada tingkat 5% – 7% atau lebih. Namun kemudian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pangalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada kenaikan PDB saja tidak mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar yaitu ketika sejumlah besar negara-negara Dunia Ketiga mencapai sasaran pertumbuhan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi taraf hidup sebagian besar masyarakatnya tidak berubah. Kemudian

dalam pandangan ekonomi baru, pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam rangka pengurangan atau pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran dalam hubungannya dengan perekonomian yang sedang tumbuh (Todaro, 1994: 88).

Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994: 90).

Lincoln Arsyad memberikan definisi pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu Negara meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu (Lincoln Arsyad, 1998: 14):

suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.

usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.

kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Todaro, keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, (3) meningkatnya

kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom for servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Arsyad, 1999: 5).

Jadi bisa disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang diikuti oleh meningkatnya pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang lama dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Pembangunan Ekonomi

Pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai tiga sasaran yaitu (Yuanita Suprihani, 2001: 23):

Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Memperluas pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap orang pada khususnya dan bagi bangsa pada umumnya.

Tujuan Pembangunan Ekonomi

Menurut Baldwin dan Meier, tujuan pembangunan ekonomi ada dua yaitu:

Tujuan primer atau utama adalah untuk meningkatkan output nasional dan pendapatan masyarakat

Tujuan sekunder atau sampingan adalah mengusahakan distribusi pendapatan yang merata, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Todaro, 1997: 14 menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk mengurangi atau menghapus tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan tujuan pembangunan bagi bangsa Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Permasalahan yang timbul akibat kesalahan upaya pembangunan yang dilakukan adalah (Tri Widodo, 2006: 7):

a. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering dijumpai di hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan yang terjadi pun memiliki karakteristik yang hampir sama di mana kemiskinan yang tinggi terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau sebuah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Secara sederhana kemiskinan (absolut) dapat didefinisikan sebagai

ketidakmampuan sejumlah penduduk untuk hidup di atas garis kemiskinan atau batas kemiskinan yang ditetapkan berdasar kategori tertentu.

Untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang terjadi di sebuah negara atau wilayah tertentu, para ekonom sering menggunakan indikator tingkat kemiskinan (*poverty gap*). Indikator ini mengukur total pendapatan yang dibutuhkan oleh penduduk miskin agar dapat hidup di atas garis kemiskinan.

b. Pemerataan

Permasalahan kedua yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita yang diterima oleh penduduk di kawasan perkotaan. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah pedesaan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan di kawasan perkotaan. Perbedaan kedalaman ketimpangan antara yang terjadi di daerah pedesaan dengan ketimpangan yang terjadi di kawasan perkotaan disebabkan karena variasi tipe pekerjaan yang terdapat di kedua wilayah tersebut.

c. Pertumbuhan

Proses pembangunan yang dilakukan di setiap negara tidak dapat dilepaskan dari permasalahan kemiskinan dan ketimpangan

distribusi pendapatan. Profesor Kuznets mengajukan sebuah teori mengenai perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan dimana ketimpangan yang dialami oleh negara yang sedang membangun akan tinggi ketika pembangunan sedang berada dalam tahap awal pembangunan. Tingkat ketimpangan ini akan terus naik seiring dengan pembangunan yang dilakukan hingga pada titik tertentu tingkat ketimpangan ini akan turun.

B. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 108). Dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah berperan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Untuk membangun perekonomian daerah, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan.

Pembangunan yang dilakukan di daerah tidak hanya di tingkat pusat tetapi dapat dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu daerah, propinsi, Kabupaten, kecamatan, desa, dan lain-lain. Seringkali pembangunan yang dilakukan di daerah yang lebih kecil, mampu memberikan hasil yang mampu mendukung pembangunan yang dilakukan di wilayah yang lebih besar. Pada tingkat yang lebih kecil, pembangunan dilakukan di tingkat daerah setingkat propinsi maupun setingkat Kabupaten dan kota (Tri Widodo, 2006: 6).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antar sektor dan daerah, antarprovinsi, antarKabupaten/kota, serta antara provinsi dan Kabupaten/kota.

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar

prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal tersebut memang perlu dilakukan karena potensi pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, maka sumberdaya yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, akibatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lambat dan bahkan akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang meningkat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah di Indonesia ditentukan oleh kontribusi pertumbuhan 9 sektor ekonomi. Pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi cenderung berbeda, sehingga berpengaruh pada perubahan struktur perekonomian suatu daerah.

3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah (Arsyad dalam Yuanita Suprihani, 2001 : 26)

Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah juga modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi ke daerah yang berupah rendah.

Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Teori Lokasi

Perusahaan cenderung meminimumkan biaya produksinya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dan pasar. Di samping itu, banyak variabel lain yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi.

Keterbatasan teori ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

Teori Tempat Sentral

Teori ini bermaksud untuk menghubungkan tempat sentral dengan daerah belakangnya dan mendefinisikan tempat sentral sebagai suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah belakangnya.

Teori Kuasasi Komulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan dasar-dasar dari teori kausasi komulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperarah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut.

Model Daya Tarik (*Attracton Model*)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan intensif.

4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Lincolin Arsyad (1999 : 127), perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya–sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimumkan dampak yang ditimbulkan oleh hambatan tersebut, perencanaan harus dilakukan sebagai tahap penting dalam proses pembangunan (Tri Widodo, 2006: 9).

Kegiatan perencanaan ekonomi untuk pengembangan sektor kegiatan ekonomi dimulai dengan melakukan proses identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah, yaitu:

12. Sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa mendatang.
13. Sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang tinggi.

Ada tiga implikasi dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai berikut (Yuanita Suprihani, 2001: 28) :

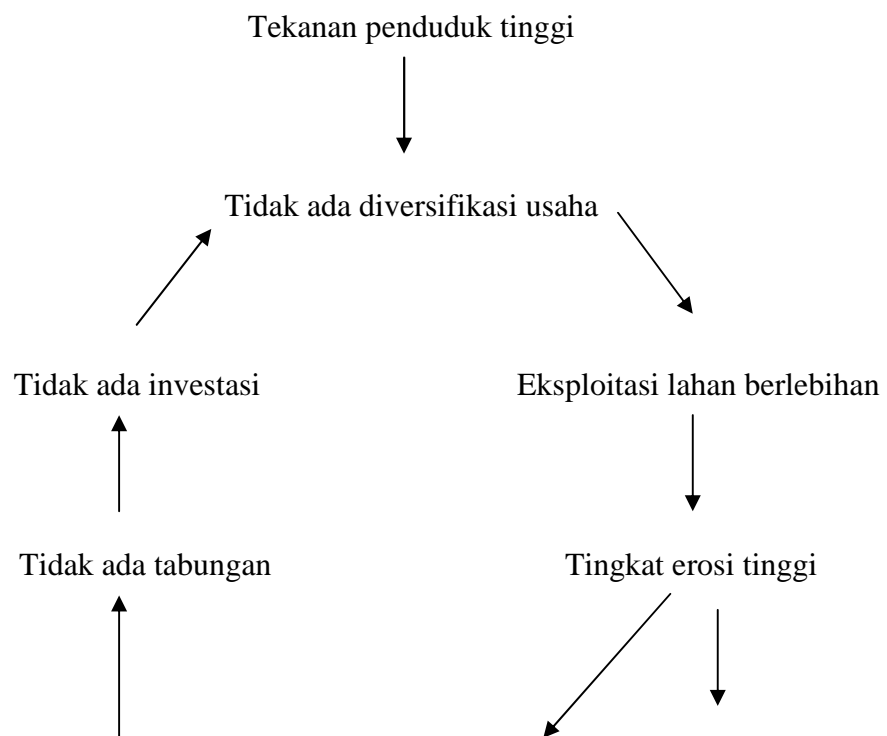
✧ Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antardaerah dengan lingkungan nasional (baik secara horizontal maupun vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

✧ Sesuatu yang tampak baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik untuk daerah belum tentu baik secara nasional.

✧ Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat

dilakukan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencana dengan obyek perencanaan.

Kegiatan perencanaan ini juga harus memperhatikan adanya degradasi potensi yang mungkin ditimbulkan oleh eksploitasi potensi daerah yang dilakukan secara kontinyu. Para perencana harus mampu membuat suatu perencanaan yang tepat sasaran dalam mengatasi, mengantisipasi dan menyasati terjadinya degradasi potensi yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi potensi daerah. Daur ini dikenal sebagai lingkaran kemiskinan dan kerusakan lingkungan (Mugi Rahardjo, 2007).



Pendapatan masyarakat
menurun ← Produktivitas
lahan turun

C. OTONOMI DAERAH

1. Pengertian Otonomi Daerah

UU No 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2005: 76).

2. Tujuan Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara filosofis memiliki dua tujuan utama yaitu:

tujuan demokrasi sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal

tujuan kesejahteraan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Mardiasmo (2002: 59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut HAW Widjaja (2005: 76), Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini yaitu menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi Pemda secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

3. Alasan Adanya Otonomi Daerah

Mardiasmo (2002: 66) menjelaskan alasan yang mendasari pemberian otonomi daerah luas dan desentralisasi adalah:

Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa mendatang. Pada suatu era dimana *globalization cascade* semakin meluas, pemerintah akan kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, informasi, ide serta transaksi keuangan.

4. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Landasan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dimana di dalamnya terdapat pula penyelenggaraan pembangunan daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasi, peraturan perundangan ini memiliki sejumlah keterkaitan dengan peraturan perundangan lain. Beberapa yang terpenting adalah:

- a. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara prinsip mengatur tentang prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar pendanaan pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan

(DBH, DAU, dan DAK), lain-lain pendapatan (pendapatan hibah dan pendanaan dana darurat), pinjaman daerah, pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan sistem informasi keuangan daerah.

b. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara prinsip mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/lembaga asing, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana, masyarakat, serta ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi.

c. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang secara prinsip mengatur seluruh proses perencanaan pembangunan nasional yang meliputi ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, tahapan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, data dan informasi, sampai pada kelembagaan perencanaan pembangunan.

d. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara prinsip mengatur tentang pejabat perbendaharaan negara, pelaksana pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang, pengelolaan

piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- e. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang secara prinsip mengatur tentang lingkup pemeriksaan dan pelaksanaan atas pengelolaan keuangan negara, hasil pemeriksanaan dan tindak lanjut, pengenaan ganti rugi negara dan ketentuan pidana.

D. PENELITIAN SEBELUMNYA

1. Mudrajad Kuncoro dalam penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999 ” memiliki kesimpulan bahwa menurut Tipologi Klassen, maka keberadaan Kabupaten Kotabaru merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Analisis LQ menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sub-sektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat. Berdasarkan analisis indeks spesialisasi menunjukkan bahwa adanya kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,11 yaitu dari 0,74 pada tahun 1993 menjadi 0,85 pada tahun 1999.
2. Liling Joko Suprpto (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis perubahan struktur ekonomi dan basis ekonomi propinsi di Yogyakarta

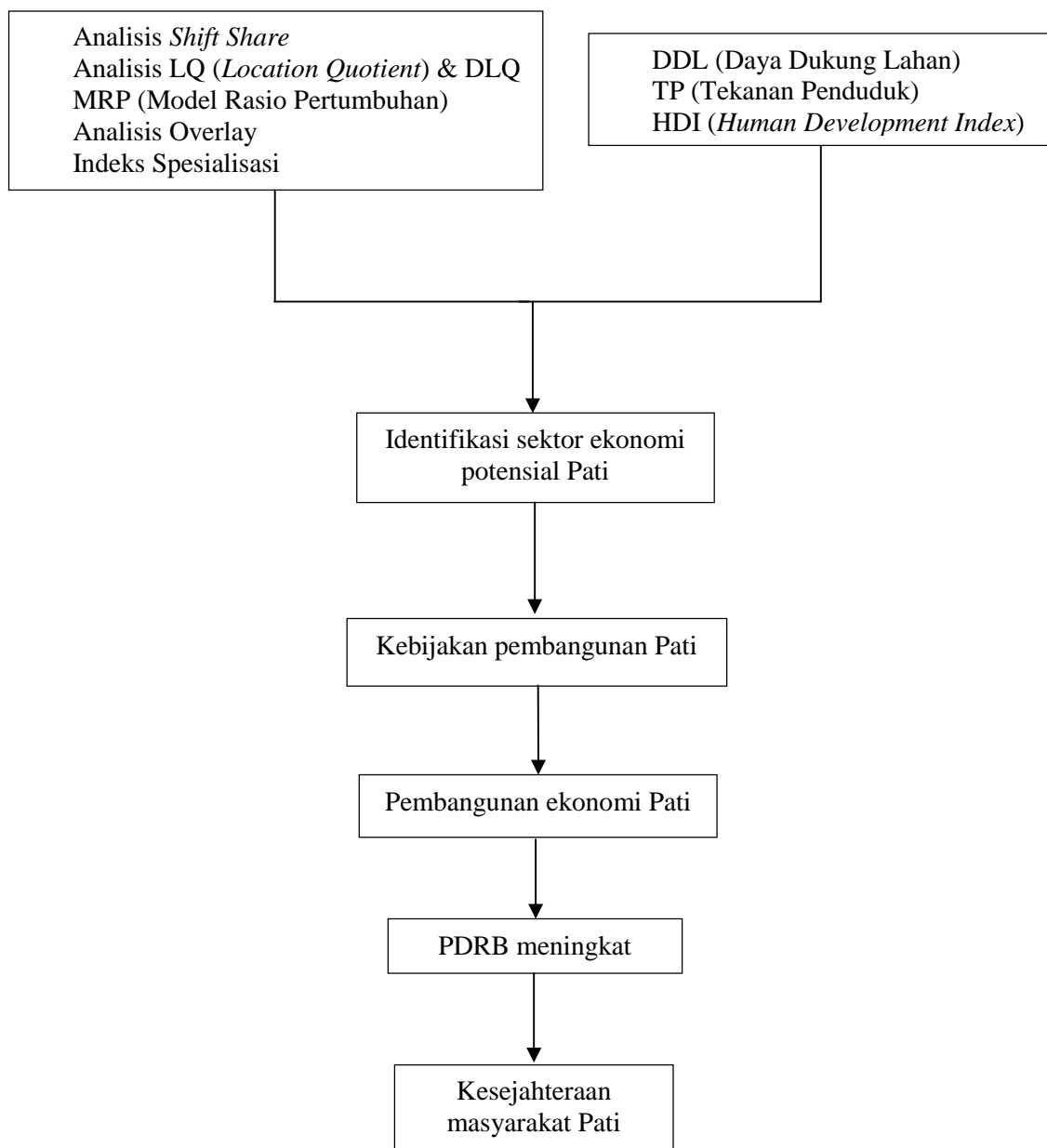
tahun 1998-2004 (implementasi pelaksanaan otonomi daerah)” memiliki kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian beda 2 mean didapat hasil bahwa hanya komponen Nij yang berbeda secara *significant* antara kedua era tersebut, sedangkan komponen Mij, C’ij dan Aij tidak berbeda secara *significant*. Berdasarkan hasil analisis indeks konsentrasi didapat hasil pola pertumbuhan ekonomi baik pada era sebelum maupun pada era otonomi daerah adalah semakin menyebar. Berdasarkan analisis indeks spesialisasi didapat hasil bahwa pola pertumbuhan ekonomi baik pada era sebelum maupun pada era otonomi daerah adalah semakin menyebar/tidak terspesialisasi. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sektor ekonomi basis antara kedua era tersebut. Dari analisis MRP didapat hasil bahwa deskripsi sektor ekonomi potensial mengalami penurunan pada era otonomi daerah dikarenakan beberapa sektor tumbuh lebih lambat dibanding sektor yang sama di wilayah nasional. Pada analisis Overlay, didapat sektor ekonomi unggulan pada era sebelum otonomi daerah adalah sektor pertanian; bangunan; perdagangan; pengangkutan; keuangan; dan jasa-jasa, sedangkan pada era otonomi daerah sektor unggulannya adalah listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan; dan keuangan.

3. Dwi Setyo Utomo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Identifikasi dan Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Gunung Kidul Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah” memiliki kesimpulan bahwa antara era sebelum dan sesudah atau selama pelaksanaan otonomi daerah, sektor basis di Kabupaten Gunung Kidul meliputi sektor pertanian dan

sektor pertambangan dan galian. Sektor yang mempunyai daya tumbuh cepat meliputi sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan/konstruksi. Sektor yang mempunyai daya saing lebih tinggi meliputi sektor pertambangan dan galian dan sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor yang mempunyai pertumbuhan menonjol di Kabupaten Gunung Kidul adalah sektor listrik, gas, dan air bersih.

4. Syahrul Saharuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan” memiliki kesimpulan bahwa berdasarkan analisis Shift Share, Secara umum produktivitas ekonomi regional Sulawesi Selatan masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional, akan tetapi percepatan pertumbuhannya lebih baik daripada pertumbuhan tingkat nasional. dari nilai LQ dan DLQ sektor pertanian tetap merupakan sektor basis dalam arti bahwa sektor pertanian memiliki daya saing yang relatif tinggi.

KERANGKA PIKIRAN



Sebelum pembangunan ekonomi di Kabupaten Pati dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Salah satu implementasi dari perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Pati. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode diantaranya Analisis *Shift Share*, Analisis LQ (*Location Quotient*) & DLQ, MRP (Model Rasio Pertumbuhan), Analisis Overlay, Indeks Spesialisasi, DDL (Daya Dukung Lahan), TP (Tekanan Penduduk), dan HDI (*Human Development Index*). Hasil identifikasi ini nantinya akan digunakan para penentu kebijakan untuk membuat suatu kebijakan yang akan dilakukan untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Pati.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Pati ini diharapkan dapat meningkatkan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pati, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Pati akan tercapai secara adil dan merata.

F. HIPOTESIS

Diduga terjadi perubahan struktur ekonomi prioritas yang diukur dengan analisis *Shift Share* (*SS*) dan analisis LQ di Kabupaten Pati pada masa sebelum (1998-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

Kondisi kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pati yang diukur dengan parameter MRP (Model Rasio Pertumbuhan)

diduga mengalami perbedaan pada masa sebelum (1998-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

Gambaran kegiatan perekonomian di Kabupaten Pati yang memberikan sumbangan dominan atau besar berdasarkan analisis Overlay diduga mengalami perbedaan pada masa sebelum (1998-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

Tingkat spesialisasi ekonomi suatu daerah yang diukur dengan parameter indeks spesialisasi diduga mengalami perubahan pada masa sebelum (1998-2000) maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai analisis potensi daerah di wilayah Kabupaten Pati pada tahun 1995 – 2006.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti BPS serta instansi terkait lainnya, internet dan bahan – bahan bacaan dari perpustakaan. Data yang diambil berupa data PDRB di Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah. Data yang diambil dalam kurun waktu 1995-2006, yang kemudian dibagi menjadi dua periode yaitu periode sebelum otonomi daerah (1995-2000) dan periode setelah otonomi daerah (2001-2006). Periode selama dua belas tahun dianggap dapat memenuhi kebutuhan dalam pembahasan dan merupakan data yang sudah tersedia secara lengkap.

C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

1. PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Tri Widodo, 2006: 78).

2. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi

Laju pertumbuhan sektor merupakan laju kenaikan sumbangan sektor ekonomi terhadap PDRB yang diukur dalam satuan persen (%).

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan rata-rata kenaikan penduduk dalam suatu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam prosentase.

Periode Waktu

Periode waktu merupakan waktu atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu proses kegiatan yang dinyatakan dalam satuan tahun.

D. ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara garis besar objek penelitian.

Analisis deskriptif pada penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dari Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan harga konstan pada tahun 1995-2006. kurun waktu 1995-2006 dibagi menjadi dua periode yaitu periode sebelum otonomi daerah (1995-2000) dan periode selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

E. ANALISIS HIPOTESIS

Analisis hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah dirumuskan dalam hipotesis. Adapun alat-alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis Sektor Ekonomi Prioritas

- Analisis *Shift Share*

Analisis Shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan data sama lain yaitu (Tri Widodo, 2006: 112):

Pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (*national growth effect*) yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Adapun formula dari pertumbuhan ekonomi referensi adalah sebagai berikut:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

Pergeseran proporsional (*proportional shift*) menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional. Pergeseran proporsional ini disebut juga pengaruh bauran industri (*industry*

mix). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi.

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

Pergeseran diferensial (*differential shift*) memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial positif (+) maka industri tersebut relatif tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Sehingga formula yang digunakan untuk dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

E_{ij} : nilai tambah atau PDRB dari sektor i di wilayah studi j

E_{in} : nilai tambah atau PDRB wilayah referensi (propinsi) dari sektor i

E_n : nilai tambah atau PDRB wilayah referensi

r_{ij} : laju pertumbuhan sektor i di daerah j

r_{in} : laju pertumbuhan sektor i propinsi

r_n :laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) propinsi

- **Analisis LQ (Location Quotient) dan Analisis DLQ (Dinamic Location Quotient)**

Model analisis ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau wilayah studi dengan wilayah referensi. Analisis LQ dilakukan dengan membandingkan distribusi presentase masing-masing sektor di masing-masing wilayah Kabupaten atau kota dengan propinsi (Lincoln Arsyad: 1999). Rumus LQ:

$$LQ = \frac{vikt/vkt}{Vipt/Vpt}$$

Di mana:

$vikt$ = sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah studi

vkt = PDRB total wilayah studi

$Vipt$ = sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah referensi

Vpt = PDRB total wilayah referensi

Dari hasil perhitungan analisis LQ maka masing-masing sektor ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

Jika $LQ > 1$ maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan

perekonomian wilayah referensi. Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.

Jika $LQ = 1$, maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di tingkat perekonomian wilayah referensi memiliki tingkat spesialisasi atau dominasi yang sama.

Jika $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan perekonomian wilayah referensi. Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor non basis.

Hal ini dapat diperkuat dengan analisis DLQ (Dynamic Location Quotient) dengan memasukkan proporsi laju pertumbuhan masing-masing sektor. DLQ pada dasarnya sama dengan LQ tapi terdapat penekanan pada laju pertumbuhan. Rumus dari DLQ adalah sebagai berikut (Yuwono dalam Dayu Kuswara, 2006: 29):

$$DLQ = \left[\frac{(1 + qir) / (1 + Qr)}{(1 + qin) / (1 + Qn)} \right]^t$$

Keterangan:

$1+qir$: laju pertumbuhan kesempatan kerja atau nilai produksi sektor i di daerah

$1+qin$: laju pertumbuhan kesempatan kerja atau nilai produksi i di propinsi

$1+Q_r$: laju pertumbuhan nilai total di tingkat daerah

$1+Q_n$: laju pertumbuhan nilai tabel di tingkat propinsi

t : jumlah tahun antara dua periode

Jika $DLQ > 1$, maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB daerah lebih cepat dibanding proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap PDRB propinsi

Jika $DLQ < 1$, maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB daerah lebih rendah dibanding proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap PDRB propinsi

$DLQ = 1$, maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB daerah sama atau sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap PDRB propinsi.

Model Rasio Pertumbuhan

Analisis model rasio pertumbuhan dilakukan dengan jalan membandingkan nilai-nilai pertumbuhan dengan baik dalam skala lebih kecil (daerah) maupun skala yang lebih besar (propinsi). Keduanya menunjukkan rasio perubahan (lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1) bukan berupa besar nilai (Yusuf dalam Dayu Kuswara, 2006: 30).

Pada analisis model rasio pertumbuhan dikenal dua macam perhitungan yaitu rasio pertumbuhan untuk wilayah studi atau daerah dan rasio pertumbuhan wilayah referensi atau propinsi, dengan mengkonversikan keduanya akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial di wilayah studi maupun di wilayah referensi. Pada hasil

perhitungan apabila nilai riilnya > 1 maka nilai nominalnya positif (+) sedangkan bila nilai riilnya < 1 maka nilai nominalnya minus (-).

Perhitungan untuk keduanya adalah sebagai berikut:

$$RPr = \frac{\Delta Eir / Eir(t)}{\Delta Er / Er(t)} \qquad RPs = \frac{\Delta Eij / Eij(t)}{\Delta Er / Er(t)}$$

Keterangan :

ΔEir : perubahan PDRB sektor i di wilayah propinsi

ΔEij : perubahan PDRB sektor i di daerah

ΔEr : perubahan PDRB di wilayah propinsi

Eir : PDRB sektor i di wilayah propinsi

Eij : PDRB sektor i di wilayah daerah

Interpretasi :

Klasifikasi 1, apabila nilai (+) dan (+) maka kegiatan sektor i mempunyai pertumbuhan menonjol di wilayah referensi (propinsi) maupun wilayah studi (daerah)

Klasifikasi 2, apabila (+) dan (-) maka kegiatan sektor i di wilayah referensi (propinsi) pertumbuhannya menonjol namun di wilayah studi (daerah) kurang menonjol

Klasifikasi 3, apabila (-) dan (+) maka kegiatan sektor i di wilayah referensi (propinsi) kurang menonjol namun di wilayah studi (daerah) menonjol

Klasifikasi 4, apabila (-) dan (-) maka wilayah

Analisis Overlay

Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskripsi kegiatan ekonomi potensial di wilayah studi dengan cara menggabungkan dalam satu tabel hasil perhitungan LQ serta nilai RPs dan RPr kemudian mendeskripsikannya. Interpretasi dari analisis Overlay dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan yaitu (Yusuf dalam Dayu Kuswara, 2006: 31):

Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+) berarti kegiatan sangat dominan dilihat dari kriteria pertumbuhan (RPs) maupun kriteria kontribusi (LQ dan DLQ)

Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-) berarti suatu kegiatan yang kriteria pertumbuhannya (RPs) dominan tapi dari kriteria kontribusi (LQ dan DLQ) kecil

Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+) berarti suatu kegiatan yang kriteria pertumbuhannya (RPs) kecil tapi dari kriteria kontribusi (LQ dan DLQ) besar

Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-) berarti suatu kegiatan yang tidak potensial dan dominan dilihat dari kriteria pertumbuhan (RPs) maupun kriteria kontribusi (LQ dan DLQ)

Indeks Spesialisasi

Indeks spesialisasi digunakan untuk menunjukkan tingkat spesialisasi ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi nilainya berarti secara relatif semakin tinggi pula tingkat spesialisasinya terhadap suatu sektor ekonomi dibanding daerah referensinya dan demikian sebaliknya. Secara

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional dalam Dayu Kuswara, 2006: 32):

$$SI = 0,5 \sum_{i=1}^9 \left[\frac{X_{ij}}{X_{tj}} - \frac{X_{ir}}{X_{tr}} \right]$$

Untuk $0 < SI < 1$

SI : Indeks Spesialisasi

X_{ij} : PDRB sektor i di kota atau Kabupaten j

X_{tj} : PDRB total di kota atau Kabupaten j

X_{ir} : PDRB sektor i di wilayah referensi

X_{tr} : PDRB total di wilayah referensi

Interpretasi hasil perhitungan:

- Jika SI mendekati 0 maka kota dan Kabupaten di daerah tidak memiliki kekhasan (spesialisasi) yang relatif menonjol dalam sektor i dibanding dengan daerah referensi.
- Jika SI mendekati 1 maka kota dan Kabupaten di daerah memiliki kekhasan (spesialisasi) yang relatif menonjol dalam sektor i dibanding dengan daerah referensi.

Uji Beda Dua Mean

Uji beda dua mean untuk sampel berpasangan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan peran sektor ekonomi sebelum dan sesudah dilaksanakannya UU otonomi daerah di wilayah studi. Adapaun

cara pengujian sebagai berikut (Djarwanto. PS dalam Supriyono, 2000: 57).

Hipotesis

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

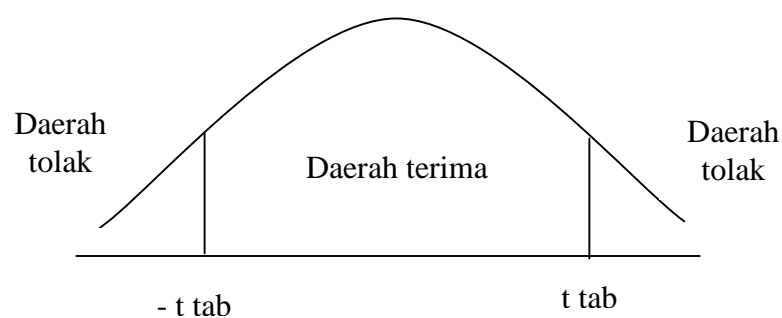
Jika tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di wilayah studi pada periode sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

$$H_0 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Jika terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di wilayah studi pada periode sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Menentukan t tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = n-1$

Daerah penerimaan dan penolakan hipotesis nol



H_0 diterima apabila : $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

Perhitungan nilai t

$$D_n = X_{1n} - X_{2n}$$

$$\bar{D} = \sum_n D$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

$$\text{Maka : } t = \frac{\bar{D}}{SD / \sqrt{n}}$$

Di mana:

D = Selisih dari observasi berpasangan

X_{1n} = Sampel pertama pada observasi ke i

X_{2n} = Sampel kedua pada observasi ke i

i = 1, 2, 3,n

\bar{D} = mean dari harga D₁ atau harga dari setiap pasang nilai

SD = deviasi standar dari harga-harga D₁

n = banyaknya pasangan nilai

Kesimpulan : H₀ diterima atau ditolak

Jika H₀ diterima berarti tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di wilayah studi sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Jika H₀ ditolak berarti terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di wilayah studi sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI DAN PEMBAHASAN

A. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PATI

1. Letak dan Keadaan Geografis

a. Letak dan batas wilayah Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah bagian timur. Secara geografis terletak diantara $110^{\circ}, 50'$ – $111^{\circ}, 15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}, 25'$ – $7^{\circ}, 00'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kudus dan Kabupaten Jepara

- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

b. Sumber daya alam

□ Luas wilayah

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.749 Ha lahan sawah dan 91.619 Ha lahan bukan sawah. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel luas tanah menurut penggunaannya yang tertera pada tabel 3.1.

Tabel 4.1 Luas dan Presentase Penggunaan Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah di Kabupaten Pati Tahun 2006 (Ha)

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
Lahan sawah	58.291	38,77
Pengairan Teknis	18.150	12,07
Pengairan ½ Teknis	8.891	5,91
Pengairan Sederhana	7.012	4,66
Pengairan Desa	1.984	1,32
Tadah Hujan	22.163	14,74
Pasang Surut	-	0,00
Lainnya	91	0,06
Lahan Bukan sawah	92.077	61,23
Rumah dan Pekarangan	28.716	19,10
Tegal	27.135	18,05
Padang Rumput	2	0,00
Hutan Rakyat	1.666	1,11

Hutan Negara	17.866	11,88
Perkebunan	2.249	1,50
Rawa-rawa	19	0,01
Tambak	10.992	7,31
Kolam	90	0,06
Tanah Lainnya	3.342	2,22
Jumlah	150.368	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

□ Tanah

Bagian utara Kabupaten Pati terdiri dari tanah Red Yellow, Latosol, Aluvial, Hidromer, dan Regosol, sedangkan bagian selatan terdiri dari tanah Aluvial, Hidromer, dan Gromosol.

Adapun rincian jenis tanah menurut kecamatan di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Batangan, Sukolilo, Gabus, dan Jakenan merupakan tanah aluvial
- b. Cluwak, Gunungwungkal, dan Gembong merupakan tanah latosol
- c. Juwana dan Margoyoso merupakan tanah aluvial dan red yellow mediteran
- d. Pati dan Margorejo merupakan tanah redyellow mediteran. Latosol, aluvial dan hidromer
- e. Kayen dan Tambakromo merupakan tanah aluvial dan hidromer
- f. Pucakwangi dan Winong merupakan tanah gromosol dan hidromer
- g. Wedarijaksa merupakan tanah red yellow mediteran, latosol dan regosol
- h. Tayu merupakan tanah aluvial, red yellow dan regosol
- i. Tlogowungu merupakan tanah latosol dan red yellow meditaran.

□ Iklim

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Pati di tahun 2006 sebanyak 1.664 mm dengan 89, 5 hari hujan, untuk keadaan cukup, sedangkan untuk teperatur terendah 23⁰ C dan tertinggi 39⁰ C.

□ Ketinggian wilayah

Wilayah Kabupaten Pati mempunyai ketinggian terendah 1 meter, ketinggian tertinggi 380 meter dan rata-ratanya ± 17 meter.

Secara rinci ketinggian per kecamatan dari permukaan air laut dapat ditunjukkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Ketinggian Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pati dari Permukaan Air Laut

Kecamatan	Ketinggian wilayah (m dpl)		
	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Sukolilo	200	1	19
Kayen	20	5	15
Tambakromo	200	10	15
Winong	20	8	18
Pucakwangi	125	20	25
Jaken	35	10	12
Batangan	4	1	3
Juwana	4	1	5
Jakenan	25	10	13
Pati	23	5	14
Gabus	30	10	15
Margorejo	32	5	15
Gembong	380	20	35
Tlogowungu	312	20	6

Wedarijaksa	28	1	18
Trangkil	36	1	10
Margoyoso	57	1	35
Gunungwungkal	300	30	20
Cluwak	282	15	20
Tayu	41	1	18
Dukuhseti	40	1	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

2. Pemerintahan

□ Pembagian wilayah administratif

Secara administratif, Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan. Menurut klasifikasinya semua desa atau kelurahan sudah menjadi desa atau kelurahan swasembada. Secara lengkap, pembagian wilayah Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

□ Jumlah anggota KORPRI (Pegawai Negeri Sipil / PNS)

Anggota KORPRI (Pegawai Negeri Sipil / PNS) yang bekerja di kantor atau dinas wilayah Kabupaten Pati sebanyak 12.057 untuk PNS Daerah dan 1.292 PNS Pusat.

Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan serta Klasifikasi Perkembangan Desa Tahun 2006

Kecamatan	Desa/Kel	RT	RW	Klasifikasi Desa/Kel		
				Swadaya	Swakarya	Swasembada
Sukolilo	16	483	80	-	-	16
Kayen	17	416	70	-	-	17

Tambakromo	18	332	62	-	-	18
Winong	30	471	81	-	-	30
Pucakwangi	20	332	67	-	-	20
Jaken	21	302	81	-	-	21
Batangan	18	266	52	-	-	18
Juwana	29	362	87	-	-	29
Jakenan	23	341	58	-	-	23
Pati	29	555	98	-	-	29
Gabus	24	398	75	-	-	24
Margorejo	18	325	62	-	-	18
Gembong	11	276	85	-	-	11
Tlogowungu	15	318	70	-	-	15
Wedarijaksa	18	338	57	-	-	18
Trangkil	16	375	60	-	-	16
Margoyoso	22	333	80	-	-	22
Gunungwungkal	15	243	47	-	-	15
Cluwak	13	287	74	-	-	13
Tayu	21	368	72	-	-	21
Dukuhseti	12	342	46	-	-	12
Jumlah	406	7.463	1.464	-	-	406

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

3. Penduduk dan Penyebarannya

□ Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pati pada akhir tahun

2005 adalah 1.225.423 orang, yang terdiri dari 604.927 orang

penduduk laki-laki dan 620.579 orang penduduk perempuan.

Sedangkan penduduk pada akhir tahun 2006 adalah sebesar 1.243.207

orang yang terdiri dari 613.628 orang penduduk laki-laki dan 629.579

orang penduduk perempuan. Selama kurun waktu 2005-2006

pertambahan penduduk Kabupaten Pati sebanyak 17.784 orang atau mempunyai pertumbuhan sebesar 1,45% dari tahun sebelumnya. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 105.159. Sedangkan kecamatan yang mempunyai penduduk terkecil adalah Kecamatan Gunungwungkal yaitu sebanyak 3.226 orang.

Sex ratio adalah angka atau bilangan yang menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki terhadap 1000 penduduk perempuan. Sex ratio Kabupaten Pati pada tahun 2006 adalah 97,47. Untuk seper kecamatan, Kecamatan Gembong mempunyai angka sex ratio yang paling tinggi yaitu sebesar 102,45 dan sex ratio terkecil adalah Kecamatan Tambakromo dengan angka 87,12. Secara rinci, jumlah penduduk dan sex ratio di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Penduduk Kabupaten Pati Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Sex Ratio Keadaan Tahun 2006

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
-----------	-----------	-----------	--------	-----------

Sukolilo	45.813	45.875	91.688	99,86
Kayen	35.759	37.292	73.051	95,89
Tambakromo	24.470	25.347	49.817	96,54
Winong	27.375	31.421	58.796	87,12
Pucakwangi	24.972	25.453	50.425	98,11
Jaken	22.221	22.988	45.209	96,66
Batangan	20.291	20.501	40.792	98,98
Juwana	43.565	43.919	87.484	99,19
Jakenan	21.191	22.849	44.040	92,74
Pati	51.343	53.816	105.159	95,40
Gabus	26.802	28.561	55.363	93,84
Margorejo	25.768	26.894	52.657	95,79
Gembong	20.675	20.181	40.856	102,45
Tlogowungu	24.658	24.992	49.650	98,66
Wedarijaksa	28.664	29.104	57.768	98,49
Trangkil	29.865	30.564	60.429	97,71
Margoyoso	36.559	36.636	73.195	99,79
Gunungwungkal	18.246	17.980	36.226	101,48
Cluwak	21.994	22.045	44.039	99,77
Tayu	34.103	34.514	68.617	98,81
Dukuhseti	29.299	28.647	57.946	102,28
Jumlah	613.628	629.579	1.243.207	97,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

□ Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk suatu daerah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

- j. kepadatan penduduk geografis, yaitu tingkat kepadatan penduduk yang dilihat dengan membandingkan jumlah penduduk pada akhir tahun dengan luas wilayahnya (km²).
- k. kepadatan penduduk agraris, yaitu angka kepadatan penduduk yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk pada sektor pertanian dengan luas lahan pertaniannya (ha).

Kabupaten Pati pada tahun 2006 mempunyai luas wilayah sebesar 1.503,68 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.243.207. Dengan demikian kepadatan penduduk secara geografis dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{dg} = \frac{\text{jumlah penduduk akhir tahun}}{\text{luas wilayah}}$$

$$P_{dg} = \frac{1.243.207}{1.503,68}$$

$$= 826,776 \text{ dibulatkan menjadi } 827$$

Jadi kepadatan penduduk Kabupaten Pati secara geografis adalah kurang lebih 827 orang per km². Sedangkan kepadatan penduduk secara agraris dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{da} = \frac{\text{jumlah penduduk sektor pertanian}}{\text{luas lahan pertanian}}$$

$$P_{da} = \frac{1.872}{58,291}$$

$$P_{da} = 32,11 \text{ dibulatkan menjadi } 32$$

Jadi kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pati kurang lebih adalah 32 orang per ha luas lahan pertanian. Artinya, per 1 ha digarap oleh 32 orang.

□ Kelahiran dan kematian

Kabupaten Pati pada akhir tahun 2006 mencatat adanya kelahiran sebanyak 16.624 dan kematian sebanyak 5.935. Dari jumlah kelahiran dan kematian didapatkan angka kelahiran dan kematian. Angka

kelahiran / kematian adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang lahir / mati selama satu tahun dari seper 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun tersebut.

Tabel 4.5 Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kabupaten Pati Tahun 1999-2006

Tahun	Kelahiran		Kematian	
	Jumlah	Angka kelahiran kasar	Jumlah	Angka kematian kasar
2006	16.624	13	5.935	5
2005	16.278	9	5.708	5
2004	11.461	9	5.099	4
2003	11.837	9	4.969	4
2002	10.724	9	4.964	4
2001	11.452	10	5.314	4
2000	11.188	9	5.564	5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran / CBR (*Crude Birth Rate*) Kabupaten Pati tahun 2006 adalah 13 dan angka kematian / CDR (*Crude Death Rate*) tahun 2006 adalah 5. Apabila batasan tentang penggolongan angka kelahiran dan kematian adalah sebagai berikut,

Angka kelahiran

75 – 125 —————> tergolong tinggi
 34 – 74 —————> tergolong sedang
 < 34 —————> tergolong rendah

Angka kematian

9 – 13 —————> tergolong rendah
 14 – 18 —————> tergolong sedang
 ≥ 19 —————> tergolong tinggi

maka angka kelahiran Kabupaten Pati tergolong rendah dan angka kematian di Kabupaten Pati juga tergolong rendah. Angka kematian yang rendah menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang baik.

□ Penduduk usia produktif dan tidak produktif

Penduduk dapat dikategorikan dalam dua usia yaitu produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif yaitu penduduk yang melaksanakan produksi dari segi ekonomi, di mana segala kebutuhan penduduk ditanggung oleh mereka sendiri. Sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk yang belum dapat bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya dan mereka yang dianggap tidak mampu lagi bekerja. Batasan umur penduduk usia produktif adalah kelompok umur 15 – 64 tahun. Sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah mereka yang berusia 0 – 14 tahun dan yang berumur 65 tahun ke atas, meskipun kenyataannya orang yang telah berumur lebih dari 65 tahun banyak yang mampu bekerja termasuk juga anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun ada yang sudah dapat bekerja. Adapun data jumlah penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2006

Kecamatan	Usia Tidak Produktif			Usia Produktif (15 - 64)	Jumlah Penduduk
	0 - 14	65 +	Jumlah		
Sukolilo	27.310	4.043	31.353	60.335	91.688
Kayen	21.965	3.270	25.235	47.816	73.051
Tambakromo	13.250	2.819	16.069	33.748	49.817
Winong	16.937	4.482	21.419	37.377	58.796
Pucakwangi	12.613	3.063	15.676	34.749	50.425
Jaken	10.781	2.886	13.667	31.542	45.209
Batangan	9.763	2.648	12.411	28.381	40.792
Juwana	21.914	4.783	26.697	60.787	87.484
Jakenan	11.334	3.171	14.505	29.535	44.040
Pati	24.965	6.312	31.277	73.882	105.159
Gabus	15.021	3.587	18.608	36.755	55.363
Margorejo	13.942	3.056	16.998	35.659	52.657
Gembong	11.326	2.350	13.676	27.180	40.856
Tlogowungu	13.187	2.957	16.144	33.506	49.650
Wedarijaksa	15.507	3.332	18.839	38.929	57.768
Trangkil	15.690	3.477	19.167	41.262	60.429
Margoyoso	19.452	3.645	23.097	50.098	73.195
Gunungwungkal	8.829	2.371	11.200	25.026	36.226
Cluwak	11.276	2.929	14.205	39.834	44.039
Tayu	18.313	4.052	22.365	46.252	68.617
Dukuhseti	15.957	3.310	19.267	38.679	57.946
Jumlah	329.332	72.543	401.875	841.332	1.243.207

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Tahun 2006

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk usia produktif

(15 – 64 tahun) berjumlah 841.332 orang, penduduk usia 0 – 14 tahun sebanyak 329.332 orang dan penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 72.543 orang. Jadi, penduduk yang berusia produktif di Kabupaten Pati lebih besar daripada penduduk yang berusia tidak produktif.

Untuk mengetahui angka ketergantungan di Kabupaten Pati, dapat dihitung dengan menggunakan angka beban ketergantungan (*Dependency ratio*). Rumus untuk menghitung angka beban ketergantungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{P(0-14) + P(65+)}{P(15-64)}$$

Sehingga nilai Dependency Ratio Kabupaten Pati dapat dihitung sebagai berikut:

$$DR = \frac{329.332 + 72.543}{841.332}$$

$$= \frac{401.875}{841.332}$$

$$= 0,4776 \text{ dibulatkan menjadi } 0,5$$

Jadi angka beban ketergantungan di Kabupaten Pati adalah sebesar 0,5. Hal ini berarti bahwa seper 100 orang produktif harus menanggung 50 orang yang tidak produktif.

4. Sosial

□ Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan variabel input yang mempunyai determinasi kuat terhadap kualitas manusia sebagai individu maupun masyarakat.

Output yang dihasilkan adalah produktifitas, kreativitas, etos kerja dan kemandirian. Indikator yang kerap digunakan untuk menggambarkan kemajuan penduduk adalah status, pendidikan tertinggi, partisipasi dan kemampuan baca tulis serta berbahasa.

Tabel 4.7 Banyak Sekolah, Murid, Guru TK dan Ratio Murid terhadap Guru di Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2006

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid Sekolah	Ratio Murid terhadap Guru
Sukolilo	17	803	73	47	11
Kayen	12	361	54	30	7
Tambakromo	16	527	43	33	12
Winong	32	841	71	26	12
Pucakwangi	18	415	55	23	8
Jaken	15	439	51	29	9
Batangan	18	667	51	37	13
Juwana	34	2.491	119	73	21
Jakenan	23	694	57	30	12
Pati	35	2181	159	62	14
Gabus	23	802	63	35	13
Margorejo	18	706	62	39	10
Gembong	10	223	38	22	6
Tlogowungu	15	379	60	25	6
Wedarijaksa	18	899	80	50	11
Trangkil	13	913	48	70	19
Margoyoso	30	1.470	149	49	10
Gunungwungkal	15	303	31	20	10
Cluwak	16	426	49	27	9
Tayu	22	1.017	90	46	11
Dukuhseti	12	680	47	57	14
Jumlah	412	17.237	1.456	42	12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

❑ **Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Pembinaan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Salah satu sasaran pembinaan

kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan balita. Usaha yang dilakukan ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan memeperpanjang usia harapan hidup. Usaha-usaha tersebut terkait dengan penanganan kelahiran, imunisasi, pemberian ASI dan status gizi balita.

Penggalakan program KB sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran juga telah menunjukkan peningkatan. Persentase peserta KB aktif tertinggi adalah

Tabel 4.8 Jumlah PUS, Peserta KB Aktif dan Persentasenya terhadap PUS di Kabupaten Pati Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif	PUS	Persentase KB Aktif terhadap PUS
Sukolilo	15.667	18.536	84,52
Kayen	11.707	15.582	75,13
Tambakromo	8.726	11.402	76,53
Winong	10.031	13.143	76,32
Pucakwangi	8.286	10.202	81,22
Jaken	7.545	9.416	80,13
Batangan	7.644	9.407	81,26
Juwana	14.945	18.666	80,07
Jakenan	8.213	10.759	76,34
Pati	15.003	19.211	78,10
Gabus	9.765	12.785	76,38
Margorejo	9.180	11.516	79,72
Gembong	7.595	9.647	78,73
Tlogowungu	8.187	10.511	77,89
Wedarijaksa	9.103	11.754	77,45
Trangkil	9.497	11.963	79,39
Margoyoso	10.007	12.883	77,68

Gunungwungkal	6.726	8.480	79,32
Cluwak	7.130	9.008	79,15
Tayu	10.685	12.931	82,63
Dukuhseti	9.687	12.366	78,34
Jumlah	205.329	260.168	78,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

□ Agama

Jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Sarana Peribadatan di Kabupaten Pati Dirinci Tifa Jenis Per Kecamatan Tahun 2006

Kecamatan	Masjid	Gereja		Vihara	Pura	Langgar
		Kristen	Katolik			
Sukolilo	80	3	-	-	-	242
Kayen	54	3	-	-	-	222
Tambakromo	47	2	-	-	-	151
Winong	49	2	-	-	-	273
Pucakwangi	57	3	-	-	-	262
Jaken	29	2	-	-	1	159
Batangan	23	3	1	-	-	45
Juwana	38	13	1	-	1	152
Jakenan	39	3	-	9	-	182
Pati	78	18	1	-	-	176
Gabus	47	2	1	2	-	211
Margorejo	43	4	1	-	-	154
Gembong	61	4	-	-	-	207
Tlogowungu	54	4	-	-	-	174
Wedarijaksa	28	9	-	-	-	184
Trangkil	30	9	-	-	-	207
Margoyoso	35	2	-	-	-	185
Gunungwungkal	28	7	-	7	-	123
Cluwak	51	5	-	9	1	192

Tayu	34	11	1	-	-	211
Dukuhseti	29	9	-	-	-	174
Jumlah	934	118	6	27	3	3.886

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2006

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2006 kinerja perekonomian Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya nilai nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan serta dari laju pertumbuhan ekonominya.

PDRB atas dasar berlaku pada tahun 2006 mencapai 4.942.598.636.000 rupiah, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.. Pada tahun 2006, PDRB Kabupaten Pati atas dasar harga konstan mencapai 5.609.463.539.000 rupiah.

Tabel 4.10 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1471000,86	1550140,70	1673221,87	1877187,62	2169278,01
2. Pertambangan dan Penggalian	29432,67	31363,45	33477,35	35978,11	42576,49
3. Industri Pengolahan	380520,99	418116,47	463231,23	514325,64	599909,43
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	53315,42	70530,97	86210,00	98158,71	112803,99
5. Bangunan	77910,95	86426,62	99840,03	115415,08	138717,38
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	526317,52	570159,76	620162,78	689000,84	795244,77
7. Pengangkutan dan Komunikasi	109867,27	119469,67	144176,00	169233,79	194077,31
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	197509,33	239440,56	274303,10	291913,36	332518,51
9. Jasa-Jasa	282166,23	370794,64	391188,35	441260,46	518657,54
Total PDRB	3138053,24	3461272,72	3808092,25	4260493,61	4942598,64

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka 16.01%, meningkat 4.13% dari tahun sebelumnya (tahun 2005 =11.88%).

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati atas dasar harga konstan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2004 rata-rata laju perekonomian Kabupaten Pati sebesar 8.50%, mengalami penurunan 3.47% dari tahun sebelumnya (tahun 2003= 11.97%). Pada tahun 2005, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati merangkak naik

mencapai angka 10.31%. Selanjutnya pada tahun 2006, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 24.76%, ini menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi di Kabupaten Pati semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.11 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1550949,02	1674400,33	1771384,24	1925457,29	2624652,25
2. Pertambangan dan Penggalian	31032,32	33068,04	35296,83	37933,50	44890,50
3. Industri Pengolahan	401202,11	440840,88	488407,61	542278,97	632514,19
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	60541,21	80089,97	97893,97	111462,08	128092,22
5. Bangunan	82145,38	91123,86	105266,29	121687,83	146256,60
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	568507,25	615863,90	669875,16	744231,31	858991,78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	116312,82	126478,56	152634,33	179162,18	205463,18
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	202588,05	245597,49	281356,48	299419,57	341068,83
9. Jasa-Jasa	341398,49	448631,75	473306,50	533889,73	627533,99
Total PDRB	1550949,02	1674400,33	1771384,24	1925457,29	2624652,25

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006 (Data Diolah)

Tabel 4.12 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2002-2006 (Prosentase)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2002	10.43	6.22
2003	10.30	11.97
2004	10.02	8.50
2005	11.88	10.31
2006	16.01	24.78

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006 (Data Diolah)

Tabel 4.13 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2006 (Prosentase)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan
-----------------------	---------------------------------

	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	46.23	44.58	43.47	42.83	46.79
2. Pertambangan dan Penggalian	0.93	0.88	0.87	0.84	0.80
3. Industri Pengolahan	11.96	11.74	11.98	12.06	11.28
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.80	2.13	2.40	2.48	2.28
5. Bangunan	2.45	2.43	2.58	2.71	2.61
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16.95	16.40	16.44	16.55	15.31
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.47	3.37	3.75	3.99	3.66
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	6.04	6.54	6.90	6.66	6.08
9. Jasa-Jasa	10.18	11.94	11.61	11.88	11.19

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan terpenting dalam perekonomian di Kabupaten Pati. Pada tahun 2006 sektor pertanian memberikan sumbangan atau kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pati yaitu sebesar 46.79%. Tiga sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Pati adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa. Peranan sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Pati pada tahun 2006 masing-masing sebesar 15.31%, 11.28%, dan 11.19%.

6. Tekanan Penduduk dan Daya Dukung Lahan

i. Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan penduduk suatu daerah terhadap lahan pertanian. Rumus untuk menghitung angka beban ketergantungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$TP = (1 - \alpha)Z \frac{fi.Po(1+r)^y}{L}$$

Keterangan:

TP = lahan pertanian

α = presentase kontribusi pendapatan di luar sektor pertanian (rata-rata nilai $\alpha = 35\%$ (Ida Bagoes Mantra, 79: 2003))

Z = luas lahan minimum untuk hidup layak per hektar per kepala

f_i = fraksi petani, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian

P_o = jumlah penduduk pada tanah datar

r = rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk

t = periode waktu dalam tahun

L = luas lahan produktif yang terdiri dari sawah, tegal, dan pekarangan

Untuk menghitung tekanan penduduk Kabupaten Pati, terlebih dahulu dihitung beberapa variabel pendukungnya yaitu laju pertumbuhan penduduk dan Z.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Cara perhitungan laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan rumus ((Drs. Hg. Suseno Triyanto Widodo, 1990 : 38):

$$P_t = P_o(1 + r)^n$$

Keterangan:

P_t = Banyaknya penduduk pada tahun akhir

P_o = Jumlah penduduk pada tahun awal

r = Angka pertumbuhan

n = Waktu antara P_0 dan P_t (dihitung mulai dengan sampai dengan)

Sehingga laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{t_{06}} = P_{0_{04}}(1+r)^n$$

$$1243205 = 1218267 (1+r)^2$$

$$1243205/1218267 = (1+r)^2$$

$$1,0205 = (1+r)^2$$

$$^{(1+r)}\log 1,0205 = 2$$

$$\text{Log } 1,0205/ 2 = \log (1+r)$$

$$\text{Anti log } 0,0045 = 1+r$$

$$1,0104 = 1+r$$

$$r = 1,04 \%$$

2. Z (luas lahan minimum untuk hidup layak)

Z dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengeluaran untuk hidup layak oleh sebuah keluarga atau individu dengan nilai bersih pendapatan yang diperoleh pada setiap 1 ha lahan pertanian selama 1 tahun. Ukuran untuk hidup layak, digunakan kriteria 2* ambang garis kemiskinan, ekuivalen beras versi Profesor Sayogya, yaitu 2 kali untuk hidup diatas garis kemiskinan atau $2 \times 360 \text{ kg} = 720 \text{ kg/ KK/tahun}$. Sedangkan nilai

produksi yang diperoleh untuk setiap tanaman yang bisa dihasilkan dari lahan di wilayah Kabupaten Pati.

Pengeluaran minimum untuk hidup layak Kabupaten Pati adalah 720 kg x Rp 4000, 00 =Rp 2.880.000 kg/KK/tahun. Rata-rata jumlah keluarga di Kabupaten Pati adalah 4 orang. Maka pengeluaran untuk hidup layak apabila dihitung per keluarga adalah Rp 2.880.000 kg/tahun x 4 = Rp 11.520.000 kg/KK/ tahun.

Dari hasil data yang diperoleh (lampiran 13) menunjukkan bahwa nilai produksi rata-rata untuk tiap 1 ha tanah pertanian adalah sebagai berikut:

❖ Sawah

- Biaya Produksi Padi

Produksi padi 9.120 kg; harga Rp 2.150,00 kg

$$\text{Nilai produksi : } 9.120 \times 2.150 \times 3 = 58.824.000$$

$$\text{Biaya produksi} = \underline{8.536.000}$$

$$\text{Nilai produksi bersih} \quad 50.288.000$$

$$\text{Nilai } Z_s = \frac{\text{hidup layak}}{\text{total nilai produksi bersih}}$$

$$= \frac{11.520.000}{50.288.000}$$

$$= 0,229 \text{ ha/orang}$$

❖ Tegal

1. Biaya Produksi Jagung

Produksi jagung 2.439 kg; harga Rp 1.800,00 kg

$$\text{Nilai produksi : } 2.439 * 1.800 = 4.390.200$$

$$\text{Biaya produksi} = \underline{2.377.000}$$

$$\text{Nilai produksi bersih} = 2.013.200$$

m. Biaya Produksi Kacang Tanah

Produksi kacang tanah 3.784 kg; harga Rp 4.000,00 kg

$$\text{Nilai produksi : } 3.784 * 4.000 = 15.136.000$$

$$\text{Biaya produksi} = \underline{9.226.000}$$

$$\text{Nilai produksi bersih} = 5.910.000$$

n. Biaya Produksi Ubi Kayu

Produksi ubi kayu 30.000 kg; harga Rp 950,00 kg

$$\text{Nilai produksi : } 30.000 * 950 = 28.500.000$$

$$\text{Biaya produksi} = \underline{19.309.850}$$

$$\text{Nilai produksi bersih} = 9.190.150$$

Nilai produksi bersih tegal:

$$= \frac{2.013.200 + 5.910.000 + 9.190.150}{3}$$

$$= \frac{17.113.350}{3}$$

$$= 5.704.450$$

$$\text{Nilai } Z_s = \frac{\text{hiduplayak}}{\text{total nilai produksi bersih}}$$

$$= \frac{11.520.000}{5.704.450}$$

$$= 2,019 \text{ ha/orang}$$

$$Z_t = \frac{(Zs_{xluaslahansawah}) + (Ztxluastegal)}{totalluasan}$$

$$= \frac{(0,229 \times 58291) + (2,019 \times 27135)}{58291 + 27135}$$

$$= \frac{68.134,204}{85.426}$$

$$= 0,797 \text{ ha/orang}$$

$$TP = (1 - X)Z \frac{fixPo(1+r)^t}{L}$$

$$= (1 - 0,35)0,797 \frac{0,0604 \times 1.243.205(1 + 0,0104)^1}{85.426}$$

$$= 0,518 \times 0,89$$

$$= 0,46$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil bahwa tekanan penduduk Kabupaten Pati menunjukkan angka 0,46 ($TP < 1$). Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Kabupaten Pati masih sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk (tekanan ringan). Penduduk sudah banyak yang melakukan diversifikasi usaha di luar sektor pertanian, terutama di sektor industri pengolahan (lampiran 14).

ii. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan pertanian merupakan indikator yang menunjukkan suatu wilayah mendapat swasembada pangan yang diukur

dari ketersediaan bahan pangan khususnya beras. DDL dapat diformulasikan (Mugi Rahardjo dalam Faizal Reza Salahudin, 2005: 56):

$$\alpha = \frac{\left(\frac{\text{luaspanen}}{\text{jumpenduduk}} \right)}{\frac{\text{KHM}}{\text{yieldberas}}}$$

Pada penghitungan daya dukung lahan, nilai dari konsumsi hidup minimum (KHM) didasarkan pada kriteria yang dikemukakan oleh Profesor Sayogya, yaitu sebesar 115 kg/ KK/tahun. Produksi atau satuan luas dan waktu (yield) dipergunakan rata-rata produksi padi per ha yang dikonversikan menjadi beras. Besar konversi pada beras menggunakan kriteria BPS yaitu 68%.

Adapun hasil penghitungan daya dukung lahan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{\left(\frac{\text{luaspanen}}{\text{jumpenduduk}} \right)}{\frac{\text{KHM}}{\text{yieldberas}}}$$

$$\alpha = \frac{\left(\frac{92.761}{1.225.423} \right)}{\frac{115}{4.916 + 0,68}}$$

$$\alpha = \frac{0,076}{0,02}$$

$$\alpha = 3,8$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai α Kabupaten Pati baik menunjukkan angka > 1 ($\alpha = 3,8$). Hal ini berarti bahwa Kabupaten Pati mampu swasembada pangan atau jumlah

penduduk Kabupaten Pati di bawah jumlah penduduk optimal sehingga produksi pangan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Pati.

7. HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Perkembangan Manusia)

HDI merupakan indeks komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan ukuran komprehensif dari pembangunan manusia.

Berikut merupakan tabel perkembangan HDI Kabupaten Pati.

Tabel 4.14 Data HDI Kabupaten Pati

Tahun	HDI
1999	65.2
2002	68.5
2004	70.6
2005	70.9
2006	71.8

Sumber: badan Pusat Statistik Kabupaten Pati

HDI Kabupaten Pati mempunyai kecenderungan menaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 HDI Kabupaten Pati menunjukkan angka 65,2. Pada tahun 2002 HDI Kabupaten Pati mencapai nilai 68,5 , meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 1999 = 65,2). Selanjutnya, dari tahun ke tahun berikutnya, HDI Kabupaten Pati mengalami kecenderungan naik secara signifikan (tahun 2004= 70,6; tahun 2005 = 70,9; tahun 2006; 71,8). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pati semakin mengalami peningkatan.

B. PEMBAHASAN

1. ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis deskriptif pada penelitian ini akan membahas mengenai PDRB Kabupaten Pati dan PDRB Propinsi Jawa Tengah berdasarkan harga konstan pada tahun 1998-2006, yang dibagi dalam dua periode yaitu periode sebelum otonomi daerah (1995-2000) dan periode selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006).

Tabel 4.15 PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	557086,68	597069,19	695674,87	1156350,09	1289167,42	1261917,18
2. Pertambangan dan Penggalian	9416,79	10912,77	11706,81	14279,68	25113,40	25743,91
3. Industri Pengolahan	129590,17	210541,99	207317,28	265629,92	286874,88	316811,24
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	11397,29	11516,53	14230,49	19552,54	24029,40	29416,09
5. Bangunan	41516,82	50544,15	52476,94	53306,23	67319,17	71044,14
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	204049,69	217365,41	245145,76	384744,56	412145,86	446434,14
7. Pengangkutan	37833,24	49432,60	54341,33	80987,82	84670,13	90894,64

dan Komunikasi						
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	86464,85	110771,76	137046,67	151342,45	158098,66	164987,34
9. Jasa-Jasa	110966,23	125851,30	144977,16	170852,20	213515,93	260020,06
Total PDRB	1188321,77	1384005,70	1562917,31	2297045,48	2560934,84	2667268,75

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1550222,16	1550949,02	1674400,33	1771384,24	1925457,29	2624652,25
2. Pertambangan dan Penggalian	29228,90	31032,32	33068,04	35296,83	37933,50	44890,50
3. Industri Pengolahan	361475,91	401202,11	440840,88	488407,61	542278,97	632514,19
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	39109,31	60541,21	80089,97	97893,97	111462,08	128092,22
5. Bangunan	74461,00	82145,38	91123,86	105266,29	121687,83	146256,60
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	509826,25	568507,25	615863,90	669875,16	744231,31	858991,78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	97235,26	116312,82	126478,56	152634,33	179162,18	205463,18
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	179059,61	202588,05	245597,49	281356,48	299419,57	341068,83
9. Jasa-Jasa	317520,91	341398,49	448631,75	473306,50	533889,73	627533,99
Total PDRB	3158139,31	3354676,64	3756094,79	4075421,41	4495522,45	5609463,54

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006 (Data Diolah)

Pada periode sebelum otonomi daerah (tahun 1995-2000), PDRB Kabupaten Pati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2000, PDRB Kabupaten Pati menunjukkan angka sebesar Rp 2.667.268.753.000, naik Rp 106.333.910.000 dari tahun sebelumnya (tahun 1999= Rp 2.560.934.843.000).

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Pati adalah sektor pertanian. Pada tahun 2000, output dari sektor

pertanian sebesar Rp 1.261.917.181.000, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 1999= Rp 1.289.167.416.000).

Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Pati adalah:

- sektor perdagangan, hotel dan restoran
- sektor industri pengolahan
- sektor jasa-jasa
- sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan.

Nilai dari keempat sektor ini dan sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi kecil bagi perekonomian Kabupaten Pati dari tahun 1998 sampai tahun 2000 terus mengalami peningkatan.

Perkembangan pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000, pendapatan per kapita meningkat sebesar Rp 72.531.460 dari tahun sebelumnya (1999 =Rp 2.215.013.910). Rata-rata pendapatan per kapita periode sebelum otonomi daerah adalah sebesar Rp 2.166.762.974.

Pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2006), PDRB Kabupaten Pati juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari kontribusi per sektor ekonomi maupun dari total PDRB. PDRB yang dihasilkan bahkan lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelum otonomi daerah.

Sektor pertanian tetap merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Kabupaten Pati. Sektor ekonomi

lain yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB atau perekonomian Kabupaten Pati adalah:

1. sektor industri pengolahan
2. sektor perdagangan, hotel, dan restoran
3. sektor industri pengolahan
4. sektor jasa-jasa
5. sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

Perkembangan pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, pendapatan per kapita meningkat sebesar Rp 831.708.940 dari tahun sebelumnya (1999 =Rp 3.702.154.450). Rata-rata pendapatan per kapita periode selama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar Rp 3.381.532.687, lebih tinggi dibanding pada periode sebelum otonomi daerah.

Tabel 4.16 PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	12174973220	13094087573	15098662094	25006232110	29165399525	34562768911
2. Pertambangan dan Penggalian	577639140	688001274	751681158	986522300	1113057702	1249759514
3. Industri Pengolahan	16389567302	18631416035	21291738979	25749680316	32577803253	37070879889
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	401233051	468216966	538092507	694144348	793491473	1054117417
5. Bangunan/Konstruksi	2348311485	2762553619	3099308909	3558936400	4717726125	5671248018
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10615317069	12114885557	14006286184	21937063069	25717272722	30281001131
7. Pengangkutan dan	2027927197	2445756412	2727316071	4211519288	4913800789	6102143339

Komunikasi						
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	2590874529	2994005377	3743992068	3532897802	4214504597	4944000745
9. Jasa-Jasa	4825185827	5356139437	5997437110	8730069723	10060500421	10635536064
PDRB	51951028822	58555062248	67254515080	94407065357	113273556607	131571455028

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, 2006 (Data Diolah)

Pada periode sebelum otonomi daerah (tahun 1995-2000), PDRB Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dilihat dari tiap sektor ekonomi maupun total PDRB. Pada tahun 2000, PDRB Propinsi Jawa Tengah menunjukkan angka sebesar Rp 131.571.455.028.000.000, naik Rp 18.297.898.421.000.000 dari tahun sebelumnya (tahun 1999 = Rp 113.273.556.607.000.000).

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Propinsi Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2000, output dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 37.070.879.889.000.000, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 1999= Rp 32.577.803.253.000.000). Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Propinsi Jawa Tengah adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa.

Lapangan usaha	2001	2002	2003	2004	2005	200
1. Pertanian	38164757854	38555719699	38722225539	44080010601	51311028497	6569263796
2. Pertambangan dan Penggalan	1482201667	1542260822	1828164828	2032302274	2494368450	314352953
3. Industri Pengolahan	43757701468	53123310878	61785971734	69619993719	87153690704	10216017153
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1263270953	1871014638	2434002770	2861224421	3410886135	381982270
5. Bangunan/ Konstruksi	6390388135	8757870655	10531281976	12909699161	16011355241	1890689904
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	35960901284	35083527621	39305080191	42843096139	51466237768	6102084265
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7364870388	9332039611	11657901542	12906416026	16313033518	1978652790
8. Keuangan, Sewa	5658657451	6569717598	7344621056	8215626733	9498734310	1092580131

dan Jasa Perusahaan						
9. Jasa-Jasa	11986505770	14881150922	18225033216	20509529296	24108733653	2948271149
PDRB	152029254971	169716612444	191834282851	215977898368	261768068276	31493894415

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, 2006 (Data Diolah)

Periode selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2006), PDRB Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, baik dilihat dari per sektor ekonomi maupun total PDRB. Pada tahun 2006, PDRB Propinsi Jawa Tengah menunjukkan angka sebesar Rp 314.938.944.153.000.000, naik Rp 53.170.875.877.000.000 dari tahun sebelumnya (tahun 2005= Rp 261.768.068.276.000.000).

Sektor industri pengolahan tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Propinsi Jawa Tengah selama pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun 2006, output dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 102.160.171.537.000.000, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2005= Rp 261.768.068.276.000.000).

Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Propinsi Jawa Tengah adalah:

1. sektor pertanian
2. sektor perdagangan, hotel dan restoran
3. sektor jasa-jasa
4. sektor pengangkutan dan komunikasi
5. sektor bangunan
6. sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, dan air bersih masih tetap memberikan kontribusi kecil bagi perekonomian atau PDRB Propinsi Jawa Tengah.

2. ANALISIS HIPOTESIS

Analisis Sektor Ekonomi Prioritas

- Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* ini digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pati (era sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah) relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi yaitu Propinsi Jawa Tengah sebagai referensi atau acuan.

Berdasarkan metode Analisis *Shift Share* tersebut, maka hasil penelitian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Pati sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Hasil Analisis *Shift Share* pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah (Jutaan Rupiah)

Lapangan usaha	Sebelum otonomi daerah			
	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
1. Pertanian	22151655,81	5014564,58	-6268725,94	20897494,45
2. Pertambangan dan Penggalian	361378,44	-81124,09	228209,45	508463,80
3. Industri Pengolahan	5466276,13	-790619,00	505621,89	5181279,02
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	420519,65	35835,38	1296,79	457651,82
5. Bangunan/Konstruksi	1213446,49	-23517,93	-480588,55	709340,01
6. Perdagangan, Hotel dan	7477292,06	1264247,38	-2119483,30	6622056,14

Restoran				
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1573158,03	359143,22	-516374,09	1415927,17
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	3075795,40	-1033945,78	-168229,77	1873619,85
9. Jasa-Jasa	3823751,32	-694673,24	458071,76	3587149,84
Total	45563273,35	4049910,52	-8360201,77	41252982,09

Lapangan Usaha	Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
1. Pertanian	21073340,67	2775717,56	3294449,19	27143507,42
2. Pertambangan dan Penggalian	387313,88	82517,85	-119241,45	350590,28
3. Industri Pengolahan	5291674,03	45544,00	770984,08	6108202,11
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	959856,77	-291146,51	1638479,11	2307189,37
5. Bangunan/Konstruksi	1167109,31	3111,97	495520,29	1665741,57
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7348070,72	-578660,57	1041607,97	7811018,12
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1642161,92	269756,32	622881,03	2534799,27
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	2743769,44	-808747,45	1792804,62	3727826,61
9. Jasa-Jasa	5108838,73	-120145,20	2431858,53	7420552,06
Total	45722135,47	1377947,98	11969343,36	59069426,81

Dari tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa pada periode sebelum otonomi daerah, PDRB Kabupaten Pati mengalami penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 41,25 triliun. Hal ini dapat dilihat dari nilai D_{ij} yang positif pada sembilan sektor kegiatan ekonomi. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Pati adalah:

1. sektor pertanian
2. sektor perdagangan, hotel da restoran
3. sektor industri pengolahan

4. sektor jasa-jasa
5. sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan
6. sektor pengangkutan dan komunikasi

Adapun sektor-sektor ekonomi yang kompetitif di Kabupaten Pati pada periode sebelum otonomi daerah adalah :

- A. sektor pertambangan dan penggalian
- B. sektor industri pengolahan
- C. sektor listrik, gas dan air bersih
- D. sektor jasa-jasa

Nilai C_{ij} yang negatif mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan *competitiveness* relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat provinsi. Sektor-sektor yang mengalami penurunan *competitiveness* pada periode ini adalah:

sektor pertanian

sektor bangunan/konstruksi

perdagangan, hotel dan restoran

sektor pengangkutan dan komunikasi

sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan

Sektor-sektor yang komponen pertumbuhan proposional atau bauran industrinya memiliki nilai positif adalah:

1. sektor pertanian
2. sektor listrik, gas dan air bersih
3. sektor perdagangan, hotel dan restoran

4. sektor pengangkutan dan komunikasi

Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor sejenis di wilayah Jawa Tengah dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian wilayahnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Kabupaten Pati , pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan nilai positif (N_{ij}) pada seper sektor ekonomi dengan total output Rp 45,56 triliun.

Pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah, PDRB Kabupaten Pati mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 59,06 triliun, lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelum otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai D_{ij} yang positif pada sembilan sektor kegiatan ekonomi. Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Pati. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil pada kenaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Pati adalah sektor pertambangan dan penggalian. Untuk Sektor-sektor perekonomian yang lain memberikan kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan pada periode sebelum otonomi daerah.

Pada periode ini, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan *competitiveness*, sedangkan ke delapan sektor

ekonomi lainnya (sektor pertanian; industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa) mengalami kenaikan *competitiveness*.

Sektor-sektor yang komponen pertumbuhan proposional atau bauran industrinya memiliki nilai positif adalah:

sektor pertanian

sektor penggalian dan pertambangan

sektor industri pengolahan

sektor bangunan

sektor pengangkutan dan komunikasi

Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor sejenis di wilayah Jawa Tengah dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian wilayahnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Kabupaten Pati pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah juga menunjukkan nilai positif (N_{ij}) pada seper sektor ekonomi, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan pada periode sebelum adanya otonomi daerah dengan total output Rp 45,72 triliun.

Uji Beda Dua Mean

Hasil perhitungan uji beda dua mean (lampiran 9) pada *level of significance* 5% menunjukkan bahwa komponen D_{ij} dan M_{ij} yang berbeda secara *significant* ($t_{hit} < t_{tsb}$) pada periode sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan komponen C_{ij} dan N_{ij} tidak berbeda secara *significant* ($-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$).

- Analisis LQ dan DLQ

Tabel 4.18 Hasil Analisis LQ Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah

Lapangan Usaha	Sebelum Otonomi Daerah		Selama pelaksanaan otonomi daerah	
	LQ	Nominal	LQ	Nominal
1. Pertanian	1,91	Basis	2,16	Basis
2. Pertambangan dan Penggalian	0,79	Non Basis	0,91	Non Basis
3. Industri Pengolahan	0,43	Non Basis	0,37	Non Basis
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,21	Basis	1,78	Basis
5. Bangunan/Konstruksi	0,67	Non Basis	0,45	Non Basis
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,73	Non Basis	0,82	Non Basis
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,80	Non Basis	0,61	Non Basis
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	1,64	Basis	1,73	Basis
9. Jasa-Jasa	1,00	Basis	1,23	Basis

Dengan menggunakan metode LQ, diketahui bahwa di Kabupaten Pati pada periode sebelum adanya otonomi daerah (1995-2000) maupun periode selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006) terdapat beberapa sektor ekonomi yang bisa dijadikan sebagai sektor ekonomi basis atau potensial. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio masing-masing sektor ekonomi yang menunjukkan nilai lebih dari satu. Adapun sektor – sektor basis di Kabupaten Pati sebelum periode otonomi daerah adalah:

1. sektor pertanian
2. sektor listrik, gas, dan air bersih
3. sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan
4. sektor jasa-jasa

Dari tabel 4.18, terlihat bahwa sektor pertanian lebih potensial dibandingkan sektor lainnya. Namun, beberapa sektor sekunder (terutama sektor listrik, gas, dan air bersih) dan tersier (terutama sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan) juga memiliki potensi yang relatif baik untuk dikembangkan.

Analisis LQ ini dapat diperkuat dengan analisis DLQ (Dynamic Location Quotient) yang dilakukan dengan cara memasukkan proporsi laju pertumbuhan masing-masing sektor.

Hasil perhitungan analisis DLQ Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4.19 Hasil Analisis DLQ Kabupaten Pati Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah

Lapangan Usaha	Sebelum Otonomi Daerah		Selama pelaksanaan otonomi daerah	
	Rata-rata	Nominal	Rata-rata	Nominal
1. Pertanian	0,77	Lambat	0,71	Lambat
2. Pertambangan dan Penggalian	2,48	Cepat	0,68	Lambat
3. Industri Pengolahan	1,52	Cepat	1,06	Cepat
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,58	Cepat	3,65	Cepat
5. Bangunan/Konstruksi	0,78	Lambat	1,27	Cepat
6. Perdagangan, Hotel	0,92	Lambat	1,10	Cepat

dan Restoran				
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,91	Lambat	1,40	Cepat
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	0,35	Lambat	1,73	Cepat
9. Jasa-Jasa	3,34	Cepat	1,30	Cepat

Berdasarkan hasil analisis DLQ di Kabupaten Pati diperoleh bahwa

pada periode sebelum otonomi daerah (1995-2000), sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; dan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan daerah lain di Propinsi Jawa Tengah. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan.

Pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006), sektor ekonomi di Kabupaten Pati yang potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan daerah lain di Propinsi Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan. Dari uji DLQ pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang non basis (hasil uji LQ), menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Beberapa sektor ekonomi yang pada periode sebelum otonomi daerah (1995-2000) diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan, ternyata mengalami pertumbuhan

melambat pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah (2001-2006). Sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor yang mengalami perkembangan cepat adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan.

Uji Beda Dua Mean

Hasil perhitungan uji beda dua mean (lampiran 10) pada *level of significance* 5% diperoleh nilai Standar Deviasi adalah sebesar 0,24, $t_{hitung} = -1,21$ dan nilai t_{tabel} 2,306. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-2,306 \leq -1,21 \leq 2,306$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pati sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan)

Berdasarkan perhitungan model rasio pertumbuhan, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.20 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah

Lapangan Usaha	Sebelum otonomi daerah				Selama pelaksanaan otonomi daerah			
	RPr	Nominal	RPs	Nominal	RPr	Nominal	RPs	Nominal
1. Pertanian	1,00	+	0,71	-	1,05	+	0,63	-
2. Pertambangan dan Penggalian	0,73	-	1,04	+	1,15	+	0,59	-
3. Industri Pengolahan	1,06	+	1,03	-	1,01	+	0,80	-
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,26	+	1,03	+	0,77	-	1,72	+
5. Bangunan/Konstruksi	1,34	+	0,72	-	1,01	+	0,94	-
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,98	-	0,75	-	0,94	-	0,75	-
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,13	+	0,96	-	1,13	+	1,08	+
8. Keuangan, Sewa dan Jasa	1,02	+	0,91	-	0,76	-	0,97	-

Perusahaan								
9. Jasa-Jasa	0,59	-	1,05	+	0,96	-	0,95	-

Hasil interpretasi dari perhitungan analisis Model Rasio Pertumbuhan pada periode sebelum otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor pertanian kurang menonjol baik di wilayah referensi (Jawa Tengah) maupun di Kabupaten Pati.
2. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian kurang menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun menonjol di Kabupaten Pati.
3. Pertumbuhan sektor industri pengolahan menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.
4. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih menonjol baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Pati.
5. Pertumbuhan sektor bangunan/konstruksi menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.
6. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran kurang menonjol baik di wilayah referensi (Jawa Tengah) maupun di Kabupaten Pati.
7. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.

8. Pertumbuhan sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.
9. Pertumbuhan sektor jasa-jasa kurang menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun menonjol di Kabupaten Pati.

Sedangkan hasil interpretasi dari perhitungan analisis Model Rasio Pertumbuhan pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor pertanian kurang menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun menonjol di Kabupaten Pati.
2. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.
3. Pertumbuhan sektor industri pengolahan menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.
4. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih menonjol baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Pati.
5. Pertumbuhan sektor bangunan/konstruksi menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.
6. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran kurang menonjol baik di wilayah referensi (Jawa Tengah) maupun di Kabupaten Pati.
7. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi menonjol di Propinsi Jawa Tengah namun kurang menonjol di Kabupaten Pati.

8. Pertumbuhan sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan kurang menonjol baik di wilayah referensi (Jawa Tengah) maupun di Kabupaten Pati.
9. Pertumbuhan sektor jasa-jasa menonjol baik di wilayah referensi (Jawa Tengah) maupun di Kabupaten Pati.

Uji Beda Dua Mean

o. RPr

Hasil perhitungan uji beda dua mean (lampiran 11) pada *level of significance* 5% diperoleh nilai Standar Deviasi adalah sebesar 0,30, $t_{hitung} = 0,37$ dan nilai $t_{tabel} = 2,306$. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-2,306 \leq 0,37 \leq 2,306$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pati sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

p. RPs

Hasil perhitungan uji beda dua mean (lampiran 11) pada *level of significance* 5% diperoleh nilai Standar Deviasi adalah sebesar 0,32, $t_{hitung} = -0,24$ dan nilai $t_{tabel} = 2,306$. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-2,306 \leq -0,24 \leq 2,306$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di

Kabupaten Pati sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis Overlay

Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskripsi kegiatan ekonomi potensial di wilayah studi dengan cara menggabungkan dalam satu tabel hasil perhitungan LQ serta nilai RPs dan RPr kemudian mendeskripsikannya.

Tabel 4.21 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah

Lapangan usaha	Sebelum otonomi daerah				Selama otonomi daerah			
	RPs	Nominal	LQ	Nominal	RPs	Nominal	LQ	Nominal
1. Pertanian	0,71	-	1,91	+	0,63	-	2,16	+
2. Pertambangan dan Pengalihan	1,04	+	0,79	-	0,59	-	0,91	-
3. Industri Pengolahan	1,03	+	0,43	-	0,8	-	0,37	-
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,03	+	1,21	+	1,72	+	1,78	+
5. Bangunan/Konstruksi	0,72	-	0,67	-	0,94	-	0,45	-
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,75	-	0,73	-	0,75	-	0,82	-
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,96	-	0,80	-	1,08	-	0,61	-
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	0,91	-	1,64	+	0,97	-	1,73	+
9. Jasa-Jasa	1,05	+	1,00	+	0,95	-	1,23	+

Hasil interpretasi dari perhitungan analisis Overlay pada periode sebelum otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Sektor pertanian memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (+).

Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena meskipun kontribusinya tinggi terhadap perekonomian tetapi memiliki

pertumbuhan yang rendah. Sektor ini sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.

2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan (+) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang potensial meskipun memberi kontribusi rendah, namun memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sektor ini sedang mengalami perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB.
3. Sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan (+) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang potensial meskipun memberi kontribusi rendah, namun memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sektor ini sedang mengalami perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB.
4. Sektor listrik, gas, dan air bersih memiliki pertumbuhan (+) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul karena mempunyai tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
5. Sektor bangunan memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang

rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.

6. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
8. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena meskipun kontribusinya tinggi terhadap perekonomian tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah. Sektor ini sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.
9. Sektor jasa-jasa memiliki pertumbuhan (+) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul karena mempunyai tingkat pertumbuhan dan tingkat

kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat prioritas dalam pembangunan.

Hasil interpretasi dari perhitungan analisis Overlay pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- Sektor pertanian memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena meskipun kontribusinya tinggi terhadap perekonomian tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah. Sektor ini sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.
- Sektor pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
- Sektor pengolahan memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
- Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki pertumbuhan (+) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul karena mempunyai tingkat

pertumbuhan dan tingkat kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat prioritas dalam pembangunan.

- Sektor bangunan memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
- Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
- Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (-). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang rendah baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
- Sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena meskipun kontribusinya tinggi terhadap perekonomian tetapi memiliki pertumbuhan yang

rendah. Sektor ini sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.

- Sektor jasa-jasa memiliki pertumbuhan (-) dan kontribusi (+). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena meskipun kontribusinya tinggi terhadap perekonomian tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah. Sektor ini sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.

Indeks Spesialisasi

Berdasarkan perhitungan melalui indeks spesialisasi, pada periode sebelum otonomi daerah, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Pati yang mempunyai kekhasan atau spesialisasi yang relatif menonjol dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah adalah:

1. sektor pertanian
2. sektor listrik, gas, dan air bersih
3. sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

Sedangkan pada periode sebelum otonomi daerah, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Pati yang mempunyai kekhasan atau spesialisasi yang relatif menonjol dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah adalah:

sektor pertanian

sektor listrik, gas, dan air bersih

sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

sektor jasa-jasa

Tabel 4.22 Hasil Analisis Indeks Spesialisasi Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah

Lapangan Usaha	Sebelum Otonomi Daerah		Selama pelaksanaan otonomi daerah	
	Rata-rata	Nominal	Rata-rata	Nominal
1. Pertanian	0,11314	+	0,12009	+
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,00114	-	-0,00041	-
3. Industri Pengolahan	-0,08024	-	-0,09983	-
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,00072	+	0,00441	+
5. Bangunan/Konstruksi	-0,00636	-	-0,01485	-
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-0,02655	-	-0,02158	-
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-0,00407	-	-0,01134	-
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	0,01237	+	0,01297	+
9. Jasa-Jasa	-0,00055	-	0,01053	+

Uji Beda Dua Mean

Hasil perhitungan uji beda dua mean (lampiran 12) pada *level of significance* 5% diperoleh nilai Standar Deviasi adalah sebesar 0,0141, $t_{hitung} = 0,1728$ dan nilai $t_{tabel} 2,306$. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-2.306 \leq 0,1728 \leq 2.306$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan peran sektor ekonomi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pati sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Shift Share, diketahui bahwa di Kabupaten Pati antara masa sebelum dan selama diterapkannya otonomi daerah, tidak terdapat perubahan secara meyakinkan berdasarkan pengujian dua beda mean

dalam hal “dampak pertumbuhan nasional (Nij) dan pengaruh keunggulan kompetitif / daya saing (Cij). Sehingga Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Pati diduga mengalami perubahan baik sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah adalah tidak terbukti.

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ), dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pati tidak terdapat perubahan secara meyakinkan berdasarkan pengujian dua beda mean dalam hal sektor basis dan non basis ekonomi di Kabupaten Pati periode sebelum dan selama diterapkannya otonomi daerah. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi basis sektoral di Kabupaten Pati diduga mengalami perubahan baik sebelum otonomi dan selama otonomi daerah adalah tidak terbukti.

2. Berdasarkan analisis MRP, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pati sebelum dan selama diterapkannya otonomi daerah, tidak terdapat perubahan secara meyakinkan berdasarkan pengujian dua beda mean dalam hal dalam sektor unggulan dan kegiatan ekonomi yang potensial baik ditingkat propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Pati. Sehingga hipotesis ketiga bahwa kegiatan ekonomi potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Pati diduga mengalami perubahan baik pada era sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah adalah tidak terbukti.
3. Berdasarkan Analisis Overlay, pada periode sebelum otonomi daerah, sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Pati adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih;

sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan. Sedangkan pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah, sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Pati adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

4. Berdasarkan analisis indeks spesialisasi, dapat diketahui baik sebelum dan selama berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Pati tidak memiliki kekhasan (spesialisasi) secara relatif menonjol dalam sektor-sektor ekonomi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis kelima yang menyatakan tingkat spesialisasi ekonomi di Kabupaten Pati diduga mengalami perubahan baik sebelum otonomi dan selama otonomi daerah tidak terbukti.

SARAN

Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor yang tertinggal di Kabupaten Pati, agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan sektor tersebut di masa depan.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah hendaknya disamping memprioritaskan pada sektor dan subsektor unggulan (kontribusi (+) dan pertumbuhan (+)) yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, juga memperhatikan sektor dan subsektor yang sebenarnya unggul namun memiliki pertumbuhan yang rendah (kontribusi (+) dan pertumbuhan (-)), yaitu sektor pertanian, sektor

keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa untuk bisa dipacu pertumbuhannya.

Untuk sektor listrik, gas dan air bersih pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan dalam hal pelanggaran misal pencurian air, pencurian atau penyalahgunaan pemakaian listrik dan sebagainya.

Untuk sektor pertanian, pemerintah daerah dapat meningkatkan penyuluhan-penyuluhan pertanian serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan penurunan hasil pertanian akibat bencana alam, misal banjir. Untuk sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan pemerintah daerah sebaiknya membuat suatu kebijakan yang intinya mempermudah dan mempersingkat syarat-syarat serta birokrasi dalam pemanfaatan fasilitas. Dalam sektor jasa-jasa sebaiknya dilakuakn peningkatan pelayanan kepada konsumen sehingga mereka nyaman dalam menggunakan fasilitas jasa tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pati hendaknya lebih menggali potensi pengembangan sektor pertanian, meskipun sektor pertanian memiliki kontribusi besar namun memiliki kecenderungan menurun. Dengan semakin mantapnya sektor pertanian ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor yang lain terutama di bidang industri, mengingat di Kabupaten Pati terdapat banyak industri makanan dan minuman. Selain itu, dengan mantapnya sektor pertanian juga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE
- BPS Kabupaten Pati. 2001. *Pati dalam Angka*. Pati: BPS
- BPS Kabupaten Pati. 2006. *Pati dalam Angka*. Pati: BPS
- BPS Kabupaten Pati. 1995. *PDRB Kabupaten Pati Tahun 1995*. Pati: BPS
- BPS Kabupaten Pati. 1996. *PDRB Kabupaten Pati Tahun 1996*. Pati: BPS
- BPS Kabupaten Pati. 1997. *PDRB Kabupaten Pati Tahun 1997*. Pati: BPS
- Buku Pegangan 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah*
- Irawan dan M. Suparmoko. 1993. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Kuncoro M dan Aswandi. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17, No. 1, 2002, 27 - 45
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Kuswara, Dayu. 2005. *Analisis Potensi untuk Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi :Universitas Sebelas Maret
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

- Rahardjo, Mugi. 2007. *Buku Pegangan Mata Kuliah Ekonomi Regional*.
Surakarta: UNS
- Salahudin, Fahrizal Reza. 2005. *Identifikasi Sektor-sektor Ekonomi Unggulan, Tekanan Penduduk, dan Daya Dukung Lahan di Propinsi Jawa Tengah*.
Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi : Universitas Sebelas Maret
- Saharudin, Syahrul. 2006. *Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan*. Vol 3
No. 1: 11-24
- Suprihani, Yuanita. 2001. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Prioritas serta Disparitas Pendapatan di Kabupaten Jepara*.
Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi : Universitas Sebelas Maret
- Supriyono. 2007. *Buku Pegangan Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan..*
Surakarta: UNS
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta:
Erlangga
- Tola, Thamrin dkk. 2007. *Analisis Daya Dukung dan Produktivitas Lahan Tanaman Pangan di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan*.*Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan* Vol. 7 No. 1 (2007) p: 13-22
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Lampiran 1
PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1995-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	500674756	536608538	625229176	1039255325	1090724028	1196868020
2. Pertambangan dan Penggalian	7967247	9232948	9904763	12081585	21247661	24416868
3. Industri Pengolahan	122910073	199689000	196630514	251937258	272087091	300480293
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	10036986	10922878	13174422	17218882	21161414	25905183
5. Bangunan	39376716	47938704	49771867	50558404	63849004	67381966
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	188906872	201234414	226953148	356192117	381559928	413303629
7. Pengangkutan dan Komunikasi	35736685	46693266	51329970	76499831	79978079	85857660
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	84297249	107994796	133611017	147548415	154135253	160851240
9. Jasa-Jasa	91713717	104016243	119823786	141209532	176471151	214906869
Total PDRB	1081620301	1264330787	1426428663	2092501349	2261213609	2489971728

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1365198010	1471000856	1550140702	1673221874	1877187620	2169278014
2. Pertambangan dan Penggalan	27722209	29432669,3	31363452,4	33477349,09	35978107,07	42576491,91
3. Industri Pengolahan	342842592	380520992,9	418116467	463231233,7	514325638,8	599909425,1
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	34441485	53315418,78	70530967,5	86210001,58	98158707,8	112803987
5. Bangunan	70622692	77910953,81	86426621,07	99840032,66	115415077,8	138717381,9
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	471991315	526317515,4	570159764,4	620162775,7	689000843,8	795244773,9
7. Pengangkutan dan Komunikasi	91846911	109867274,9	119469674,8	144176003,5	169233792,9	194077313,7
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	174570732	197509326,2	239440556,1	274303101,1	291913360,2	332518508,6
9. Jasa-Jasa	262431390	282166230,5	370794643,5	391188348,9	441260457,6	518657541,9
Total PDRB	2841667336	3138053239	3461272723	3808092250	4260493609	4942598636

Lampiran 2
PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	557086,68	597069,19	695674,87	1156350,09	1289167,42	1261917,18
2. Pertambangan dan Penggalan	9416,79	10912,77	11706,81	14279,68	25113,40	25743,91
3. Industri Pengolahan	129590,17	210541,99	207317,28	265629,92	286874,88	316811,24
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	11397,29	11516,53	14230,49	19552,54	24029,40	29416,09
5. Bangunan	41516,82	50544,15	52476,94	53306,23	67319,17	71044,14
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	204049,69	217365,41	245145,76	384744,56	412145,86	446434,14
7. Pengangkutan dan Komunikasi	37833,24	49432,60	54341,33	80987,82	84670,13	90894,64
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	86464,85	110771,76	137046,67	151342,45	158098,66	164987,34
9. Jasa-Jasa	110966,23	125851,30	144977,16	170852,20	213515,93	260020,06
Total PDRB	1188321,77	1384005,70	1562917,31	2297045,48	2560934,84	2667268,75

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	1771384,24	1925457,29	2624652,25	1771384,24	1925457,29	2624652,25
2. Pertambangan dan Penggalan	35296,83	37933,50	44890,50	35296,83	37933,50	44890,50
3. Industri Pengolahan	488407,61	542278,97	632514,19	488407,61	542278,97	632514,19
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	97893,97	111462,08	128092,22	97893,97	111462,08	128092,22
5. Bangunan	105266,29	121687,83	146256,60	105266,29	121687,83	146256,60
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	669875,16	744231,31	858991,78	669875,16	744231,31	858991,78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	152634,33	179162,18	205463,18	152634,33	179162,18	205463,18
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	281356,48	299419,57	341068,83	281356,48	299419,57	341068,83
9. Jasa-Jasa	473306,50	533889,73	627533,99	473306,50	533889,73	627533,99
Total PDRB	4075421,41	4495522,45	5609463,54	4075421,41	4495522,45	5609463,54

Lampiran 3
PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1995-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	10631588,86	11434189,88	13184650,58	21836268050	25468190450	30181351720
2. Pertambangan dan Penggalian	527281,54	628022,49	686150,87	900518960	1016023220	1140807600
3. Industri Pengolahan	14863277,45	16896352,46	19308930,98	23351723430	29543972670	33618628420
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	331214,04	386508,62	444190,21	573009510	655019610	870163830
5. Bangunan	1982583,28	2332310,96	2616619,67	3004664350	3982983090	4788002600
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9631030,91	10991554,61	12707578,52	19902988400	23332684920	27473249830
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1721990,22	2076784,92	2315867,95	3576161430	4172495400	5181562320
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2274679,52	2628611,55	3287068,51	3101736570	3700158840	4340625960
9. Jasa-Jasa	4622387,09	5131025,14	5745369,58	8363151810	9637665560	10188532910
Total PDRB	46586032,91	52505360,63	60296426,87	84610222510	101509193760	117782925190

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	33326727470	33668128270	33813526670	38492121600	44806485330	57364981870
2. Pertambangan dan Penggalian	1352985840	1407809140	1668788520	1855129610	2276913640	2869481960
3. Industri Pengolahan	39682735090	48176165610	56032110150	63136583390	79037442650	92646434520
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1042818070	1544504660	2009245970	2361913350	2815653830	3153227050
5. Bangunan	5395143170	7393911770	8891130370	10899130660	13517731950	15962321080
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	32626491470	31830470700	35660587410	38870547200	46694123550	55362794900
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6253791950	7924190260	9899168210	10959329410	13852018070	16801494450
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4968064670	5767937390	6448270230	7212976800	8339491610	9592396780
9. Jasa-Jasa	11482722430	14255707940	17459049510	19647530030	23095462680	28243576490
Total PDRB	136131480160	151968825740	171881877040	193435262050	234435323310	281996709100

Lampiran 4
PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-2006 (Jutaan Rupiah)

Lapangan usaha	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	12174973220	13094087573	15098662094	25006232110	29165399525	34562768911
2. Pertambangan dan Penggalian	577639140	688001274	751681158	986522300	1113057702	1249759514
3. Industri Pengolahan	16389567302	18631416035	21291738979	25749680316	32577803253	37070879889
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	401233051	468216966	538092507	694144348	793491473	1054117417
5. Bangunan/Konstruksi	2348311485	2762553619	3099308909	3558936400	4717726125	5671248018
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10615317069	12114885557	14006286184	21937063069	25717272722	30281001131
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2027927197	2445756412	2727316071	4211519288	4913800789	6102143339
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	2590874529	2994005377	3743992068	3532897802	4214504597	4944000745
9. Jasa-Jasa	4825185827	5356139437	5997437110	8730069723	10060500421	10635536064
Total PDRB	51951028822	58555062248	67254515080	94407065357	113273556607	131571455028

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006 dan Data Diolah

Lapangan usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	38164757854	38555719699	38722225539	44080010601	51311028497	65692637969
2. Pertambangan dan Penggalian	1482201667	1542260822	1828164828	2032302274	2494368450	3143529531
3. Industri Pengolahan	43757701468	53123310878	61785971734	69619993719	87153690704	102160171537
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1263270953	1871014638	2434002770	2861224421	3410886135	3819822704
5. Bangunan/Konstruksi	6390388135	8757870655	10531281976	12909699161	16011355241	18906899044
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	35960901284	35083527621	39305080191	42843096139	51466237768	61020842650
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7364870388	9332039611	11657901542	12906416026	16313033518	19786527908
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	5658657451	6569717598	7344621056	8215626733	9498734310	10925801316
9. Jasa-Jasa	11986505770	14881150922	18225033216	20509529296	24108733653	29482711494
Total PDRB	152029254971	169716612444	191834282851	215977898368	261768068276	314938944153

Lampiran 5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1995-2006 (%)

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	6,70	14,17	39,84	4,72	8,87	12,33	7,19	5,11	7,36	10,87	13,46
2. Pertambangan dan Penggalian	13,71	6,78	18,02	43,14	12,98	11,92	5,81	6,16	6,31	6,95	15,50
3. Industri Pengolahan	38,45	-1,56	21,95	7,41	9,45	12,36	9,90	8,99	9,74	9,93	14,27
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	8,11	17,09	23,49	18,63	18,31	24,78	35,40	24,41	18,19	12,17	12,98
5. Bangunan	17,86	3,68	1,56	20,82	5,24	4,59	9,35	9,85	13,43	13,49	16,80
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,13	11,33	36,28	6,65	7,68	12,43	10,32	7,69	8,06	9,99	13,36
7. Pengangkutan dan Komunikasi	23,47	9,03	32,90	4,35	6,85	6,52	16,40	8,04	17,14	14,81	12,80
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	21,94	19,17	9,45	4,27	4,18	7,86	11,61	17,51	12,71	6,03	12,21
9. Jasa-Jasa	11,83	13,19	15,14	19,98	17,88	18,11	6,99	23,90	5,21	11,35	14,92
PDRB	14,45	11,36	31,83	7,46	9,19	12,38	9,44	9,34	9,11	10,62	13,80

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Lampiran 6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-2006 (%)

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	7,18	16,51	66,22	11,49	-2,11	22,85	0,05	7,96	5,79	8,70	36,31
2. Pertambangan dan Penggalan	15,89	7,28	21,98	75,87	2,51	13,54	6,17	6,56	6,74	7,47	18,34
3. Industri Pengolahan	62,47	-1,53	28,13	8,00	10,44	14,10	10,99	9,88	10,79	11,03	16,64
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,05	23,57	37,40	22,90	22,42	32,95	54,80	32,29	22,23	13,86	14,92
5. Bangunan	21,74	3,82	1,58	26,29	5,53	4,81	10,32	10,93	15,52	15,60	20,19
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,53	12,78	56,95	7,12	8,32	14,20	11,51	8,33	8,77	11,10	15,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	30,66	9,93	49,04	4,55	7,35	6,98	19,62	8,74	20,68	17,38	14,68
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	28,11	23,72	10,43	4,46	4,36	8,53	13,14	21,23	14,56	6,42	13,91
9. Jasa-Jasa	13,41	15,20	17,85	24,97	21,78	22,11	7,52	31,41	5,50	12,80	17,54
PDRB	16,47	12,93	46,97	11,49	4,15	18,40	6,22	11,97	8,50	10,31	24,78

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006 dan Data Diolah

Lampiran 7
Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1995-2006 (%)

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	7,18	16,51	66,22	4,95	9,73	14,06	7,75	5,38	7,94	12,19	15,56
2. Pertambangan dan Penggalan	15,89	7,28	21,98	75,87	2,51	13,54	6,17	6,56	6,74	7,47	18,34
3. Industri Pengolahan	62,47	-1,53	28,13	8,00	10,44	14,10	10,99	9,88	10,79	11,03	16,64
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,05	23,57	37,40	22,90	22,42	32,95	54,80	32,29	22,23	13,86	14,92
5. Bangunan	21,74	3,82	1,58	26,29	5,53	4,81	10,32	10,93	15,52	15,60	20,19
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,53	12,78	56,95	7,12	8,32	14,20	11,51	8,33	8,77	11,10	15,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	30,66	9,93	49,04	4,55	7,35	6,98	19,62	8,74	20,68	17,38	14,68
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	28,11	23,72	10,43	4,46	4,36	8,53	13,14	21,23	14,56	6,42	13,91
9. Jasa-Jasa	13,41	15,20	17,85	24,97	21,78	22,11	7,52	31,41	5,50	12,80	17,54
PDRB	16,47	12,93	46,97	8,20	10,13	14,24	10,03	10,64	9,44	11,83	15,88

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Lampiran 8
Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-2006 (%)

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	7,55	15,31	65,62	16,63	18,51	27,54	16,40	28,03	-32,90	16,40	28,03
2. Pertambangan dan Penggalian	19,11	9,26	31,24	12,83	12,28	62,62	22,74	26,03	-35,35	22,74	26,03
3. Industri Pengolahan	13,68	14,28	20,94	26,52	13,79	87,80	25,18	17,22	-31,85	25,18	17,22
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	16,69	14,92	29,00	14,31	32,85	171,43	19,21	11,99	-25,10	19,21	11,99
5. Bangunan	17,64	12,19	14,83	32,56	20,21	127,63	24,03	18,08	-31,72	24,03	18,08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,13	15,61	56,62	17,23	17,75	41,49	20,13	18,56	-29,79	20,13	18,56
7. Pengangkutan dan Komunikasi	20,60	11,51	54,42	16,68	24,18	111,51	26,39	21,29	-34,77	26,39	21,29
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	15,56	25,05	-5,64	19,29	17,31	66,17	15,62	15,02	-24,81	15,62	15,02
9. Jasa-Jasa	11,00	11,97	45,56	15,24	5,72	92,84	17,55	22,29	-30,44	17,55	22,29
PDRB	12,71	14,86	40,37	19,98	16,15	64,15	21,20	20,31	-31,42	21,20	20,31

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006 dan Data Diolah

Lampiran 9
Uji Beda Dua Mean Analisis *Shift Share*

Lapangan usaha	Dij	Dij	D	(D-\bar{D})	(D-\bar{D})²
1. Pertanian	20897494	27143507	-6246013	-4266408	1,82E+13
2. Pertambangan dan Penggalian	508464	350590	157874	2137478	4,57E+12
3. Industri Pengolahan	5181279	6108202	-926923	1052682	1,11E+12
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	457652	2307189	-1849538	130067	1,69E+10
5. Bangunan/Konstruksi	709340	1665742	-956402	1023203	1,05E+12
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6622056	7811018	-1188962	790643	6,25E+11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1415927	2534799	-1118872	860733	7,41E+11
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	1873620	3727827	-1854207	125398	1,57E+10
9. Jasa-Jasa	3587150	7420552	-3833402	-1853797	3,44E+12
Total	41252982	59069427	-17816445		2,98E+13

D	-1979604,968
$t_{(0,25;8)}$	2,306
SD	1928772,919
t_{hit}	-3,079

Lapangan usaha	N_{ij}	N_{ij}	D	(D - \bar{D})	(D - \bar{D})²
1. Pertanian	22151655,81	21073341	1078315,14	1095966,49	1,20114E+12
2. Pertambangan dan Penggalian	361378,44	387313,88	-25935,44	-8284,09111	68626165,54
3. Industri Pengolahan	5466276,13	5291674	174602,1	192253,449	36961388610
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	420519,65	959856,77	-539337,12	-521685,771	2,72156E+11
5. Bangunan/Konstruksi	1213446,49	1167109,3	46337,18	63988,5289	4094531829
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7477292,06	7348070,7	129221,34	146872,689	21571586741
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1573158,03	1642161,9	-69003,89	-51352,5411	2637083479
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	3075795,4	2743769,4	332025,96	349677,309	1,22274E+11
9. Jasa-Jasa	3823751,32	5108838,7	-1285087,41	-1267436,06	1,60639E+12
Total	45563273	45722135	-158862,14		3,2673E+12

\bar{D} -17651,3489

$t_{(0,25;8)}$ 2,306

SD 639071,611

t_{hit} -0,083

Lapangan usaha	M_{ij}	M_{ij}	D	(D - \bar{D})	(D - \bar{D})²
1. Pertanian	5014564,58	2775717,56	2238847,02	1941962,29	3,77122E+12
2. Pertambangan dan Penggalian	-81124,09	82517,85	-163641,94	-460526,67	2,12085E+11
3. Industri Pengolahan	-790619	45544	-836163	-1133047,7	1,2838E+12
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	35835,38	-291146,51	326981,89	30097,1622	905839173,8
5. Bangunan/Konstruksi	-23517,93	3111,97	-26629,9	-323514,63	1,04662E+11
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1264247,38	-578660,57	1842907,95	1546023,22	2,39019E+12
7. Pengangkutan dan Komunikasi	359143,22	269756,32	89386,9	-207497,83	43055348532
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	-1033945,78	-808747,45	-225198,33	-522083,06	2,72571E+11
9. Jasa-Jasa	-694673,24	-120145,2	-574528,04	-871412,77	7,5936E+11
Total	4049910,52	1377947,98	2671962,55		8,83784E+12

D mean 296884,7278

t_(0,25;8) 2,306

SD 1051061,436

t_{hit} 0,85

Lapangan usaha	C_{ij}	C_{ij}	D	$(D - \bar{D})$	$(D - \bar{D})^2$
1. Pertanian	-6268725,94	3294449,189	-9563175,129	-7304336,782	5,33533E+13
2. Pertambangan dan Penggalian	228209,45	119241,4526	347450,9026	2606289,25	6,79274E+12
3. Industri Pengolahan	505621,89	770984,0772	-265362,1872	1993476,16	3,97395E+12
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1296,79	1638479,108	-1637182,318	621656,0293	3,86456E+11
5. Bangunan/Konstruksi	-480588,55	495520,2858	-976108,8358	1282729,511	1,64539E+12
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-2119483,3	1041607,973	-3161091,273	-902252,9259	8,1406E+11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-516374,09	622881,0261	-1139255,116	1119583,231	1,25347E+12
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	-168229,77	1792804,624	-1961034,394	297803,9533	88687194579
9. Jasa-Jasa	458071,76	2431858,534	-1973786,774	285051,5734	81254399522
Total	-8360201,77	11969343,36	-20329545,12		6,83893E+13

\bar{D} -2258838,35

$t_{(0,25;8)}$ 2,306

SD 2923810,58

t_{hit} -2,32

Lampiran 10
Uji Beda Dua Mean Analisis LQ

Lapangan usaha	Sebelum otda	Selama Otda	D	(D- \bar{D})	(D- \bar{D})²
1. Pertanian	1,91	2,16	-0,25	-0,15	0,0232
2. Pertambangan dan Penggalian	0,79	0,91	-0,12	-0,02	0,0005
3. Industri Pengolahan	0,43	0,37	0,06	0,16	0,0249
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,21	1,78	-0,57	-0,47	0,2230
5. Bangunan/Konstruksi	0,67	0,45	0,22	0,32	0,1010
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,73	0,82	-0,09	0,01	0,0001
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,80	0,61	0,19	0,29	0,0828
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	1,64	1,73	-0,09	0,01	0,0001
9. Jasa-Jasa	1,00	1,23	-0,23	-0,13	0,0175
Total			-0,88		0,4730

\bar{D} -0,10

$t_{(0,25;8)}$ 2,306

SD 0,24

t_{hit} -1,21

Lampiran 11
Uji Beda Dua Mean Analisis MRP

Lapangan usaha	RPr	RPr	D	(D-\bar{D})	(D-\bar{D})²
1. Pertanian	1	1,05	-0,05	-0,09	0,0075
2. Pertambangan dan Penggalian	0,73	1,15	-0,42	-0,46	0,2085
3. Industri Pengolahan	1,06	1,01	0,05	0,01	0,0002
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,26	0,77	0,49	0,45	0,2055
5. Bangunan/Konstruksi	1,34	1,01	0,33	0,29	0,0860
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,98	0,94	0,04	0,00	0,0000
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,13	1,13	0	-0,04	0,0013
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	1,02	0,76	0,26	0,22	0,0499
9. Jasa-Jasa	0,59	0,96	-0,37	-0,41	0,1654
Total			0,33		0,7244

\bar{D} 0,04

$t_{(0,25;8)}$ 2,306

SD 0,30

t_{hit} 0,37

Lapangan usaha	RP _s	RP _s	D	(D - \bar{D})	(D - \bar{D}) ²
1. Pertanian	0,71	0,63	0,08	0,10555556	0,011141975
2. Pertambangan dan Penggalian	1,04	0,59	0,45	0,47555556	0,226153086
3. Industri Pengolahan	1,03	0,8	0,23	0,25555556	0,065308642
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,03	1,72	-0,69	-0,66444444	0,44148642
5. Bangunan/Konstruksi	0,72	0,94	-0,22	-0,19444444	0,037808642
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,75	0,75	0	0,02555556	0,000653086
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,96	1,08	-0,12	-0,09444444	0,008919753
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	0,91	0,97	-0,06	-0,03444444	0,00118642
9. Jasa-Jasa	1,05	0,95	0,1	0,12555556	0,015764198
Total			-0,23		0,808422222

\bar{D} -0,025

$t_{(0,25;8)}$ 2,306

SD 0,32

t_{hit} -0,24

Lampiran 12
Uji Beda Dua Mean Indeks Spesialisasi

Lapangan usaha	Sebelum Otda	Selama Otda	D	(D-\bar{D})	(D-\bar{D})²
1. Pertanian	0,11314	0,12009	-0,00695	-0,01	0,0009
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,00114	-0,00041	-0,00073	0,00	0,0000
3. Industri Pengolahan	-0,08024	-0,09983	0,01959	0,02	0,0004
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,00072	0,00441	-0,00369	0,00	0,0000
5. Bangunan/Konstruksi	-0,00636	-0,01485	0,00849	0,01	0,0001
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-0,02655	-0,02158	-0,00497	-0,01	0,0000
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-0,00407	-0,01134	0,00727	0,01	0,0000
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	0,01237	0,01297	-0,0006	0,00	0,0000
9. Jasa-Jasa	-0,00055	0,01053	-0,01108	-0,01	0,0001
Total			0,00733		0,0016

\bar{D} **0.0008**

$t_{(0,25;8)}$ 2.306

SD 0.0141

t_{hit} 0.1728

Lampiran 13
Analisa Usaha Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2006

1. Biaya Produksi Padi

Uraian	Tenaga Kerja Upahan					Tenaga Kerja Keluarga				
	Fisik				Nilai (Rp)	Fisik				Nilai (Rp)
	HKP	HKW	HKT	HKM		HKP	HKW	HKT	HKM	
INPUT										
A. TENAGA KERJA										
I. Pra Panen										
1. Persemaian	4				140000					
2. Pengolahan tanah s/d siap tanam										
a. Membajak										
b. Menggaru /Meratakan					300000					
c. Mencangkul	7				245000					
3. Menanam / menugak	9	30			1365000					
4. Memupuk	3				105000					
5. Menyiang		17			595000					
6. Pengendalian hama/Penyakit	1				35000					
7. Lain-lain										
Jumlah A. I	24	47			2785000					
II. Pasca Penen										
1. Memanen										
2. Merontok										
3. Membersihkan										
4. Mengangkut					1824000					
5. Mengeringkan										
6. Menyimpan										
7. Lain-lain										
Jumlah A. II					1824000					
Jumlah A = A. I + A. II					4609000					

Uraian	Riil dikeluarkan		Diperhitungkan	
	Fisik	Nilai (Rp)	Fisik	Nilai (Rp)
B. SARANA PRODUKSI				
1. Benih / bibit (berlabel / tidak)	25	100000		
2. Pupuk				
a. Anorganik				
Urea : Pril / Brikel / Tablet	200 kg	240000		
TSP : TSP biasa / TSP Zn				
KCL / ZK				
Phonska	300 kg	525000		
b. Organik : Pupuk kandang / hijau	1000	120000		
c. PPC				
d. ZPT				
3. Pestisida				
a. Padat				
b. Cair : Nama Aploud	2 lt	220000		
Nama Score	0.5 lt	192000		
4. Herbisida				
5. Lain-lain				
Jumlah B		1397000		
C. LAIN_LAIN PENGELUARAN				
1. Pajak Lahan		50000		
2. Sewa tanah		1500000		
3. Bunga kredit				
4. Iuran P3A		980000		
Jumlah C		2530000		
Jumlah A + B + C		8536000		

2. Biaya Produksi Jagung

Uraian	Tenaga Kerja Upahan				Nilai (Rp)	Tenaga Kerja Keluarga				Nilai (Rp)
	Fisik					Fisik				
	HKP	HKW	HKT	HKM		HKP	HKW	HKT	HKM	
INPUT										
A. TENAGA KERJA										
I. Pra Panen										
1. Persemaian	5				175000					
2. Pengolahan tanah s/d siap tanam										
a. Membajak										
b. Menggaru /Meratakan										
c. Mencangkul	15				450000					
3. Menanam / menugak	2	5			160000					
4. Memupuk	1	3			100000					
5. Menyiang										
6. Pengendalian hama/Penyakit										
7. Lain-lain										
Jumlah A. I	23	8			885000					
II. Pasca Penen										
1. Memanen										
2. Merontok										
3. Membersihkan										
4. Mengangkut										
5. Mengeringkan										
6. Menyimpan										
7. Lain-lain										
Jumlah A. II										
Jumlah A = A. I + A. II					885000					

Uraian	Riil dikeluarkan		Diperhitungkan	
	Fisik	Nilai (Rp)	Fisik	Nilai (Rp)
B. SARANA PRODUKSI				
1. Benih / bibit (berlabel / tidak)			4	160000
2. Pupuk				
a. Anorganik				
Urea : Pril / Brikel / Tablet			50 kg	60000
TSP : TSP biasa / TSP Zn				
KCL / ZK			25 kg	87000
Phonska				
b. Organik : Pupuk kandang / hijau	800 kg	600000		
c. PPC	1 lt	5000		
d. ZPT				
3. Pestisida				
a. Padat				
b. Cair : Nama Regent	100 lt	20000		
Nama				
4. Herbisida				
5. Lain-lain				
Jumlah B		625000		307000
C. LAIN_LAIN PENGELUARAN				
1. Pajak Lahan		10000		
2. Sewa tanah		550000		
3. Bunga kredit				
4. Iuran P3A				
Jumlah C		560000		
Jumlah A + B + C		2377000		

3. Biaya Produksi Kacang Tanah

Uraian	Tenaga Kerja Upahan					Tenaga Kerja Keluarga				
	Fisik				Nilai (Rp)	Fisik				Nilai (Rp)
	HKP	HKW	HKT	HKM		HKP	HKW	HKT	HKM	
INPUT										
A. TENAGA KERJA										
I. Pra Panen										
1. Persemaian	4				140000					
2. Pengolahan tanah s/d siap tanam										
a. Membajak										
b. Menggaru /Meratakan					200000					
c. Mencangkul	16				240000					
3. Menanam / menugak	7	16			265000					
4. Memupuk	2				30000					
5. Menyiang										
6. Pengendalian hama/Penyakit	5				75000					
7. Lain-lain (membuat bedeng)	10				150000					
Jumlah A. I	44	16			1100000					
II. Pasca Penen										
1. Memanen					6000000					
2. Merontok										
3. Membersihkan										
4. Mengangkut										
5. Mengeringkan										
6. Menyimpan										
7. Lain-lain										
Jumlah A. II					6000000					
Jumlah A = A. I + A. II					7100000					

Uraian	Riil dikeluarkan		Diperhitungkan	
	Fisik	Nilai (Rp)	Fisik	Nilai (Rp)
B. SARANA PRODUKSI				
1. Benih / bibit (berlabel / tidak)	80 kg	720000		
2. Pupuk				
a. Anorganik				
Urea : Pril / Brikel / Tablet	200 kg	240000		
TSP : TSP biasa / TSP Zn				
KCL / ZK				
Phonska	50 kg	100000		
b. Organik : Pupuk kandang / hijau	2000 kg	400000		
c. PPC				
d. ZPT				
3. Pestisida				
a. Padat				
b. Cair : Nama				
Nama				
4. Herbisida				
5. Lain-lain (pembelian solar dan biaya operator)		450000		
Jumlah B		1460000		
C. LAIN_LAIN PENGELUARAN				
1. Pajak Lahan				
2. Sewa tanah		666000		
3. Bunga kredit				
4. Iuran P3A				
Jumlah C		666000		
Jumlah A + B + C		9226000		

4. Biaya Produksi Ubi Kayu

Uraian	Tenaga Kerja Upahan				Nilai (Rp)	Tenaga Kerja Keluarga				Nilai (Rp)
	Fisik					Fisik				
	HKP	HKW	HKT	HKM		HKP	HKW	HKT	HKM	
INPUT										
A. TENAGA KERJA										
I. Pra Panen										
1. Persemaian	4				140000					
2. Pengolahan tanah s/d siap tanam										
a. Membajak										
b. Menggaru /Meratakan	35				875000					
c. Mencangkul										
3. Menanam / menugak	5	15			425000					
4. Memupuk	5	15			425000					
5. Menyiang	10	10			450000					
6. Pengendalian hama/Penyakit										
7. Lain-lain (pengairan)					500000					
Jumlah A. I	59	40			2815000					
II. Pasca Penen										
1. Memanen										
2. Merontok										
3. Membersihkan										
4. Mengangkut										
5. Mengeringkan										
6. Menyimpan										
7. Lain-lain										
Jumlah A. II										
Jumlah A = A. I + A. II					2815000					

Uraian	Riil dikeluarkan		Diperhitungkan	
	Fisik	Nilai (Rp)	Fisik	Nilai (Rp)
B. SARANA PRODUKSI				
1. Benih / bibit (berlabel / tidak)	9998	749850		
2. Pupuk				
a. Anorganik				
Urea : Pril / Brikel / Tablet	250 kg	300000		
TSP : TSP biasa / TSP Zn				
KCL / ZK				
Phonska	200 kg	800000		
b. Organik : Pupuk kandang / hijau	2000 kg	1400000		
c. PPC				
d. ZPT				
3. Pestisida				
a. Padat	10 kg	170000		
b. Cair : Nama				
Nama				
4. Herbisida				
5. Lain-lain				
Jumlah B		3419850		
C. LAIN_LAIN PENGELUARAN				
1. Pajak Lahan				
2. Sewa tanah		7000000		
3. Bunga kredit				
4. Iuran P3A				
Jumlah C		7000000		
Jumlah A + B + C		13234850		

Lampiran 14
Jumlah Pekerja Kabupaten Pati Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2006

Lapangan Usaha	Jumlah	Fraksi Pekerja (%)
1. Pertanian	1872	6.04
2. Pertambangan dan Penggalian	1081	3.49
3. Industri Pengolahan	20849	67.24
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	397	1.28
5. Bangunan/Konstruksi	1040	3.35
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1850	5.97
7. Pengangkutan dan Komunikasi	732	2.36
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	1959	6.32
9. Jasa-Jasa	1227	3.96
Jumlah	31007	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006

Lampiran 15
Luas Panen dan Rata-Rata Produksi Padi Per Hektar Kabupaten Pati

Tahun	Luas Panen (ha)	Hasil/hektar (Kw)	Produksi (Ton)
1998	105299	47.54	500619
1999	100688	49.14	494806
2000	102253	48.56	496561
2001	98310	48.69	478679
2002	91356	50.16	458260
2003	91356	50.16	458260
2004	100495	49.21	494490
2005	92761	49.16	456019

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006